



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.434, 2021

BPOM. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Menu Pengawasan Obat Makanan. Petunjuk Operasional.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

BIDANG KESEHATAN MENU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN MENU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik POM adalah dana yang diampu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.
3. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
4. Toko Obat/Pedagang Eceran Obat yang selanjutnya disebut Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin

untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

5. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan.
6. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.
8. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluhan keamanan pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dan pendampingan IRTP atau usaha mikro dan kecil dari organisasi yang kompeten.
9. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau *District Food Inspector* yang selanjutnya disebut DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang keamanan pangan untuk melakukan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
15. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
16. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

#### Pasal 2

Petunjuk operasional penggunaan DAK Nonfisik POM merupakan acuan bagi BPOM dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan dana kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.

#### Pasal 3

- (1) DAK Nonfisik POM terdiri atas rincian menu:
  - a. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
  - b. penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT;
  - c. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan SPP-IRT dan nomor pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi untuk produk

- makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP;
- d. pemeriksaan *post-market* pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan; dan
  - e. peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian kegiatan pada menu pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian; dan
  - b. peningkatan kompetensi petugas pengawas.
- (3) Rincian kegiatan pada menu penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelaksanaan pengawasan Apotek, Toko Obat, dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
- (4) Rincian kegiatan pada menu pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan SPP-IRT dan nomor pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyelenggaraan bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP;
  - b. pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT; dan
  - c. pengkajian ulang SPP-IRT.
- (5) Rincian kegiatan pada menu pemeriksaan *post-market* pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. inventarisasi sarana IRTP;
  - b. pengawasan sarana IRTP;

- c. sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga; dan
  - d. monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP.
- (6) Rincian kegiatan pada menu peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan.

## BAB II PENGELOLAAN DAK NONFISIK POM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pengelolaan DAK Nonfisik POM meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

### Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan yang didanai DAK Nonfisik POM kepada BPOM dengan melampirkan data teknis yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat dan makanan.
- (2) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah petugas pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian;
  - b. jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) serta UMOT;

- c. jumlah IRTP;
  - d. jumlah SPP-IRT; dan
  - e. jumlah penduduk.
- (3) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan masukan bagi BPOM dalam penghitungan alokasi DAK Nonfisik POM.
  - (4) BPOM menyampaikan usulan alokasi DAK Nonfisik POM kepada Kementerian Kesehatan.
  - (5) Penetapan alokasi DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM serta data dukung yang mengacu pada besaran alokasi dan target DAK Nonfisik POM per rincian menu dan rincian kegiatan, kebutuhan dan prioritas kegiatan daerah, standar biaya daerah, serta ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik POM.
- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk setiap rincian menu DAK Nonfisik POM;
  - b. data fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) serta UMOT terbaru;
  - c. data sarana IRTP terbaru;
  - d. data SPP-IRT yang diterbitkan terbaru;
  - e. data sumber daya manusia pengawas farmasi, PKP, dan DFI terbaru;
  - f. standar satuan harga Pemerintah Daerah; dan
  - g. data sumber daya manusia pengawas pangan non-DFI.
- (3) Kepala Badan melakukan penilaian dan persetujuan terhadap rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik POM ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetujui oleh Kepala Badan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan tetap menjaga pencapaian target output minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian kegiatan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik POM yang telah disetujui oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam rangka:
  - a. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan tanpa adanya realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian

kegiatan serta dengan menjaga pencapaian *output* yang telah disetujui pada setiap rincian kegiatan.

- (5) Penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan ditetapkan.

#### Bagian Keempat Pelaporan

##### Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik POM per rincian menu yang terdiri atas:
  - a. realisasi penyerapan anggaran;
  - b. realisasi kegiatan;
  - c. permasalahan dalam pelaksanaan; dan
  - d. rencana tindak lanjut.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan melalui aplikasi SMART POM.

#### Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh:
  - a. Kepala Badan; dan

- b. Kepala Dinas Kesehatan yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
- a. secara mandiri yang dilakukan oleh unit eselon I BPOM pengampu kegiatan DAK Nonfisik POM; dan
  - b. secara terpadu yang dilakukan oleh Sekretaris Utama bersama unit eselon I BPOM pengampu kegiatan DAK Nonfisik POM, Inspektorat Utama BPOM, dan UPT BPOM.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
  - b. realisasi target setiap rincian kegiatan DAK Nonfisik POM;
  - c. realisasi penyerapan anggaran setiap rincian kegiatan DAK Nonfisik POM;
  - d. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan; dan
  - e. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik POM di daerah dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

#### Pasal 10

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik POM pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 11

Pengelolaan DAK Nonfisik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
MENU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

**PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK BIDANG KESEHATAN MENU PENGAWASAN OBAT DAN  
MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Obat dan Makanan merupakan dua kebutuhan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar, sejatinya Obat dan Makanan juga menjadi penentu kualitas kehidupan manusia. Dengan demikian, pengawasan obat dan makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah memberikan mandat kepada BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sistem pengawasan obat dan makanan bersifat luas dan berlapis yang melibatkan berbagai elemen pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Tidak hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

efektivitas pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah disamping fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan dan dengan mempertimbangkan maraknya kejadian tidak diinginkan dalam sistem pengawasan obat dan makanan, BPOM merasa perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini didukung oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang memiliki fungsi pengordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Tidak hanya melalui regulasi, peningkatan peran Pemerintah Daerah juga didorong dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Nonfisik melalui penyediaan menu Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Nonfisik POM). DAK Nonfisik POM merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pada pencapaian indikator Persentase Obat Memenuhi Syarat dan Persentase Makanan Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

DAK Nonfisik POM dilaksanakan dengan nomenklatur rincian menu dan rincian kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**B. Tujuan**

1. Tujuan Umum

Mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dan UMOT serta pengawasan *pre-market* dan *post-market* IRTP.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian terhadap standar, persyaratan, dan ketentuan peraturan terkait pengelolaan obat;
- b. Meningkatkan validitas data perizinan sarana Apotek, Toko Obat dan UMOT;
- c. Meningkatkan kompetensi sumber daya pengawas makanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- d. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan IRTP sesuai dengan pedoman, meliputi pengawasan, pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.

**C. Sasaran**

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**D. Kriteria dan Alokasi**

1. Kriteria

Penetapan Kabupaten/Kota penerima DAK Nonfisik POM didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi berupa penyampaian data teknis terkait melalui [smartbpom@pom.go.id](mailto:smartbpom@pom.go.id), dengan batas waktu penyampaian 15 Februari 2020. Khusus untuk rincian menu Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT, penetapan Kabupaten/Kota penerima juga didasarkan pada pemenuhan syarat teknis yaitu memiliki minimal 36 sarana yang terdiri dari Apotek,

Toko Obat, dan/atau UMOT serta memiliki minimal 2 (dua) petugas pengawas kefarmasian.

## 2. Alokasi

Penetapan alokasi DAK Nonfisik POM mengacu pada *unit cost* atau standar biaya yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Khusus untuk rincian menu Pengawasan *Post-Market* pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan, alokasi juga ditetapkan berdasarkan *scoring* dan formula yang disusun dengan pendekatan pada 2 (dua) perspektif risiko dan tingkat keberhasilan yaitu:

- a. risiko terhadap kesehatan masyarakat dengan menggunakan data jumlah IRTP, jumlah SPP-IRT, dan jumlah penduduk; dan
- b. tingkat keberhasilan pelaksanaan alokasi DAK dengan menggunakan data jumlah tenaga PKP, tenaga DFI, dan jumlah anggaran.

Berdasarkan pendekatan tersebut maka ditetapkan target jumlah sarana yang diperiksa dan jumlah sampel yang diuji pada suatu Kabupaten/Kota. Penetapan alokasi selanjutnya akan menyesuaikan dengan target output yang ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Penetapan target sarana per daerah Kabupaten/Kota menggunakan rumus Yamane (1967),  $e=10\%$  dimana rumus Yamane adalah penghitungan *sampling size* untuk populasi yang diketahui jumlahnya.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$n$  = ukuran sampel  
 $N$  = ukuran populasi (Jumlah IRTP)  
 $e$  = *margin of error* (10%)

Jumlah sarana yang menjadi target pemeriksaan adalah 50% dari hasil *sampling size*.

Penetapan target jumlah sampel pangan industri rumah tangga yang disampling dan diuji per daerah menggunakan formula:

Skor tingkat risiko x paparan (jumlah penduduk)



Berdasarkan kriteria dan alokasi tersebut, sebanyak 419 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai penerima BOK POM Tahun Anggaran 2021 dengan rincian alokasi per daerah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Target *output* dan alokasi pagu setiap kegiatan sesuai hasil pembahasan dan pengesahan sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I.1. Tabel Kesepakatan Pagu RKA dan Target *Output* Rincian Kegiatan per Kabupaten/Kota TA 2021.

**E. Rincian Menu dan Rincian Kegiatan**

1. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan, dengan rincian kegiatan:
  - a. Bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian; dan
  - b. Peningkatan kompetensi petugas pengawas.
2. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT, dengan rincian kegiatan:
  - a. Pelaksanaan pengawasan Apotek, Toko Obat dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
3. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT, dengan rincian kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP;
  - b. Pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT; dan
  - c. Pengkajian ulang Sertifikat Produksi.
4. Pemeriksaan *post-market* pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, dengan rincian kegiatan:
  - a. Inventarisasi sarana IRTP;
  - b. Pengawasan sarana IRTP;

- c. Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga; dan
  - d. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP.
5. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian kegiatan:
- a. KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keamanan Pangan.

#### **F. Prinsip Dasar Pengelolaan**

Pengelolaan DAK Nonfisik POM berlandaskan pada prinsip-prinsip:

1. Keterpaduan

DAK Nonfisik POM direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi untuk mencapai tujuan kegiatan melalui koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sektor terkait termasuk didalamnya bersama UPT BPOM di daerah masing-masing.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin, memenuhi sifat kepatutan dan kewajaran namun secara tepat dan cermat tanpa adanya duplikasi dengan sumber pembiayaan lain untuk mencapai *output* kegiatan yang optimal.

3. Efektif

DAK Nonfisik POM direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran dan secara keseluruhan mencapai *output* kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam pencapaian Prioritas Nasional.

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan DAK Nonfisik POM dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **G. Kebijakan Umum**

1. DAK Nonfisik POM adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membantu mendanai kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan urusan daerah dan mendukung pencapaian Prioritas Nasional.
2. DAK Nonfisik POM bukan dana utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, sehingga daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan dan

penyelenggaraan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai kewenangan secara lebih mandiri dan inovatif serta bersinergi dengan UPT BPOM di daerah masing-masing.

3. DAK Nonfisik POM hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan rincian kegiatan yang tersedia pada alokasi masing-masing daerah dan tidak dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kegiatan lain meskipun kegiatan tersebut tersedia pada menu DAK Nonfisik POM.
4. DAK Nonfisik POM hanya dapat digunakan untuk membiayai komponen pembiayaan yang dapat dibiayai pada ruang lingkup pembiayaan atau komponen pembiayaan sejenis dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan standar harga daerah.
5. Kebutuhan komponen pembiayaan di luar ruang lingkup agar dibiayai secara mandiri dari APBD tanpa adanya duplikasi sumber pembiayaan.
6. Dalam tahap perencanaan kegiatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan tetap menjaga pencapaian target *output* minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian kegiatan.
7. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan/atau dalam rangka penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing namun tidak diperkenankan untuk merealokasi anggaran antar rincian kegiatan.
8. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.
9. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilaporkan melalui aplikasi SMART POM selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan berupa inputan realisasi anggaran dan *output* per bulan pelaksanaan kegiatan, dengan format tampilan sesuai pada Anak Lampiran I.2 Format Laporan Realisasi Anggaran dan Output. Laporan kemudian dilengkapi dengan formulir-formulir laporan untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

## H. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Operasional ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang dalam hal ini terbatas pada Apotek dan Toko Obat.
3. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
4. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
5. Petugas Pengawas adalah Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten yang diberi tugas melakukan pengawasan dalam rangka pengkajian izin operasional fasilitas pelayanan kefarmasian berdasarkan surat perintah tugas.
6. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
7. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
8. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

11. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
13. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
14. Nomor Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRT.

**BAB II**  
**TATA CARA PENGGUNAAN DAK NONFISIK**  
**PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**A. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**

1. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam hal ini pengawas farmasi dan makanan, tenaga *District Food Inspector* (DFI) dan tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) penentu untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Namun berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada BPOM, umumnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan dalam hal jumlah maupun kompetensi petugas yang ada. Jumlah SDM Dinas Kesehatan yang terbatas juga berperan pada manajemen SDM yang buruk, hal ini mengakibatkan penugasan tenaga yang dikhususkan untuk melakukan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan dan pada akhirnya pengembangan kompetensi menjadi hal yang sulit untuk didapatkan. Termasuk dalam hal pengawasan makanan, hal tersebut mengakibatkan terbatasnya tenaga pengawas khususnya DFI dan PKP yang tersertifikasi sehingga tidak memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Tidak hanya dalam hal SDM pengawas, SDM kesehatan yang bergerak dalam pelayanan khususnya pada fasilitas pelayanan kefarmasian juga berperan penting untuk dapat menyediakan dan memberikan sediaan farmasi (obat) yang bermutu karena fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan muara peredaran sediaan farmasi yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk menunjang SDM pelayanan kefarmasian dalam hal menyediakan dan memberikan Obat yang memenuhi ketentuan maka diperlukan pengetahuan terkait regulasi dan standar pelayanan terkini. Oleh karena itu, selain melakukan fungsi pengawasan, Pemerintah Daerah selaku penerbit izin operasional fasilitas pelayanan kefarmasian berkewajiban melakukan pembinaan terhadap SDM Kesehatan pada sarana-sarana yang ada agar penyelenggaraan pelayanan

kefarmasian dapat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memenuhi mutu dan kompetensi SDM kesehatan, khususnya SDM yang terkait pengawasan obat dan makanan. BPOM dan Kementerian PAN dan RB telah membuka kesempatan untuk pengangkatan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing* bagi seluruh K/L dan instansi Pemerintah Daerah. Hal ini mengacu pada Peraturan MenPANRB Nomor 2 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF-PFM) dapat diampu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah di luar BPOM. Sehingga saat ini, JF-PFM terbuka (inklusif) dapat dijabat oleh PNS yang memenuhi syarat di K/L/Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk penyediaan SDM PFM di daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan SDM, sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Tidak hanya melalui regulasi, peningkatan kompetensi SDM yang berperan dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan juga dilakukan melalui dukungan penyediaan kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi yang dapat didanai dari DAK. Upaya ini merupakan bentuk implementasi dari adanya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan dilakukan melalui:

- a. Bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian; dan

- b. Peningkatan kompetensi petugas pengawas (DFI dan PKP).

Bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan agar pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dapat memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dengan standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh BPOM. Peningkatan kompetensi petugas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk tenaga DFI dan tenaga PKP yang tersertifikasi, melalui penyediaan biaya pelatihan pada lembaga penyelenggara yang tersertifikasi.

Dengan upaya-upaya tersebut, maka diharapkan akan dapat meningkatkan mutu SDM daerah sehingga efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah dapat ditingkatkan, khususnya pada daerah penerima dan pelaksana DAK Nonfisik POM TA 2021.

## 2. Tujuan

- a. Meningkatkan kompetensi petugas pengelola obat di sarana apotek, toko obat, dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya dalam pemenuhan standar dan persyaratan; dan
- b. Meningkatkan kompetensi SDM pengawas makanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

## 3. Indikator Keluaran

- a. Jumlah petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah diberi bimbingan teknis tentang penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan; dan
- b. Jumlah Pengawas Pangan kabupaten/kota yang telah tersertifikasi (kompeten) sebagai pengawas pangan sesuai dengan ketentuan.

## 4. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai

- a. Belanja kegiatan rapat persiapan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis;



- b. Belanja konsumsi kegiatan rapat;
  - c. Belanja kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis seperti biaya konsumsi, uang harian dan transport, atau biaya paket data (bagi peserta, jika dilakukan secara *online*);
  - d. Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli (hanya bagi narasumber yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber diluar fungsi ASN);
  - e. Belanja material pendukung bimbingan teknis seperti spanduk, seminar kit dan sertifikat;
  - f. Belanja sewa gedung/ruangan dan perlengkapannya apabila Dinas Kesehatan tidak memiliki ruangan yang memadai;
  - g. Belanja jasa penyelenggaraan pelatihan DFI dan pelatihan PKP oleh pihak ketiga maksimal sejumlah alokasi anggaran yang telah disepakati pada Berita Acara Kesepakatan.
5. Pelaksanaan Kegiatan
- a. Bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian
- Bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian diberikan utamanya kepada penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian dan tenaga teknis kefarmasian lainnya pada Apotek dan Toko Obat, namun dapat diperluas pada petugas kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik. Hal ini sebagai bentuk dukungan pada upaya pengawalan distribusi vaksin COVID-19 yang akan dilakukan pemerintah daerah, mengingat pendistribusian vaksin membutuhkan penanganan khusus dari tenaga yang kompeten. Total peserta yang mendapatkan bimtek adalah minimal sejumlah peserta yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.
- Jika jumlah tenaga kefarmasian yang ada melebihi dari target peserta yang dapat diberikan bimbingan teknis, maka tenaga kefarmasian yang diprioritaskan untuk diberikan bimbingan teknis ditentukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) belum pernah dikunjungi (diperiksa atau dibina) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih;
- 2) belum pernah diperiksa oleh UPT BPOM setempat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih; dan
- 3) fasilitas pelayanan kefarmasian yang pernah melakukan pelanggaran berat atau mendapatkan sanksi dari UPT BPOM dalam pengelolaan sediaan farmasi.

Bimbingan teknis dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara- cara lain yang mendukung kemudahan pemahaman materi. Agar pelaksanaan bimbingan teknis dapat berjalan dengan baik dengan output yang efektif, maka sebelum pelaksanaan bimtek agar dilakukan rapat persiapan yang diikuti dengan rapat evaluasi pelaksanaan yang dapat melibatkan OPD terkait. Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan narasumber yang kompeten sesuai bidang dan materinya. Narasumber dapat bersal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau UPT BPOM setempat atau dari instansi lain yang kompeten di bidangnya, atau dari organisasi profesi terkait misalnya Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (HISFARMA).

Materi yang dapat disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis antara lain tentang:

- 1) Standar pelayanan kefarmasian (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, atau standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di Rumah Sakit, Puskesmas, disesuaikan dengan peserta yang hadir);
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan obat, termasuk pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan kefarmasian (antara lain sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian);

- 3) Mekanisme teknis perubahan izin dan/atau pelaporan perubahan izin fasilitas pelayanan kefarmasian; dan
- 4) Edukasi terkait informasi obat melalui Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).

Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam rangka penyelenggaraan yang efektif dan efisien dimasa pandemi, bimbingan teknis dapat dilakukan secara daring, luring maupun kombinasi daring dan luring sehingga bimtek dapat menjangkau petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti kegiatan secara luring atau langsung.

Sertifikat Bimbingan Teknis diberikan kepada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis. Dalam menerbitkan sertifikat, Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat dapat bekerjasama dengan organisasi profesi Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian setempat sehingga peserta memperoleh angka Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dengan jumlah SKP yang tercantum di dalam sertifikat tersebut. Sertifikat Bimbingan Teknis dalam Pemenuhan Standar dan Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Ketua Pengurus organisasi profesi apoteker/tenaga teknis kefarmasian setempat.

- b. Peningkatan kompetensi petugas pengawas (DFI dan PKP)

Pelatihan DFI dan PKP dapat dilakukan secara daring maupun luring pada lembaga penyelenggara yang memenuhi persyaratan dengan kurun waktu pelaksanaan kegiatan tidak kurang dari 3 (tiga) hari (1 hari @ 8 jam) untuk pelatihan DFI dan 3 (tiga) hari (1 hari @ 8 jam) untuk pelatihan PKP. Pelaksanaan pelatihan meliputi pemberian materi dan/atau simulasi audit ke sarana IRTP dengan mengacu pada Peraturan BPOM tentang Pedoman Penyelenggaraan pelatihan DFI dan PKP. PKP yang dihasilkan dari pelatihan ini adalah PKP pertama dengan tugas melakukan

penyuluhan keamanan pangan dan mendampingi industri rumah tangga pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Total pelaksanaan kegiatan adalah minimal sejumlah paket pelatihan yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan dengan peserta pelatihan yang dapat mengikuti materi DFI dan/atau materi PKP. Komposisi petugas yang mendapatkan pelatihan DFI dan PKP dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jika petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terbatas maka pelatihan DFI/PKP juga dapat diperuntukan bagi petugas dari UPTD Dinas Kesehatan yang memang dilibatkan dalam pengawasan pangan.

#### 6. Pelaporan

Pelaporan kegiatan pengembangan mutu dan kompetensi teknis menggunakan formulir;

- a. Formulir II.1 Rekap Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian.
- b. Formulir II.2 Rekap Laporan Kegiatan Pelatihan DFI dan/atau PKP.

### **B. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat dan UMOT**

#### 1. Latar Belakang

Secara umum, pengawasan sediaan farmasi khususnya obat dan bahan obat di peredaran melibatkan sarana produksi, sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Sedangkan untuk pengawasan obat tradisional khususnya obat tradisional Cairan Obat Luar (COL) dan rajangan di peredaran melibatkan sarana produksi dalam hal ini adalah UMOT. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh BPOM selaku regulator, tetapi juga oleh *stakeholder* dan masyarakat. Berbeda dengan sarana produksi dan sarana distribusi, pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian tidak dilengkapi dengan bisnis proses penilaian sarana yang salah satunya dilakukan melalui proses sertifikasi, seperti sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada sarana produksi dan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada sarana

distribusi serta sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap pada UMOT. Hal ini berdampak pada munculnya risiko *gap* pada pemenuhan persyaratan dan standar pelayanan kefarmasian khususnya terkait pengelolaan obat dan produksi obat tradisional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM tahun 2019, dari 11.631 fasilitas pelayanan kefarmasian diketahui bahwa sebanyak 31,3% apotek dan 33,6% toko obat dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Temuan pelanggarannya pun cukup beragam, di antaranya adalah perizinan yang tidak sesuai dan kompetensi petugas pengelola obat yang kurang memadai. Hal ini tentu menjadi dorongan untuk adanya perbaikan dalam pengelolaan perizinan yang telah diterbitkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada sub-urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan di dalam penerbitan izin fasilitas pelayanan kefarmasian (antara lain apotek, toko obat, dan UMOT). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa dalam pelaksanaan perizinan tersebut wajib dilakukan pengawasan.

Bahwa pengawasan obat dan makanan tidak terlepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan pengawalan terhadap pengawasan pelaksanaan perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tentunya dalam menjalankan sistem pengawasan sarana tersebut juga perlu didukung dengan *database* sarana berizin yang aktual dan valid secara nasional. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut

atas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan terhadap UMOT perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk UMOT yang tidak memenuhi ketentuan serta untuk meningkatkan daya saing produk UMOT sebagai obat tradisional asli Indonesia, lokasi UMOT yang berada di kabupaten/kota dan di pelosok saat ini masih belum optimal dijangkau oleh petugas BPOM, sehingga diperlukan koordinasi terkait pengawasan kepada Pemerintah Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan UMOT.

## 2. Tujuan

- a. meningkatkan efektivitas pengawasan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi UMOT melalui pengkajian izin fasilitas pelayanan kefarmasian oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- b. adanya peningkatan kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi UMOT sesuai dengan standar yang dipersyaratkan; dan
- c. adanya kajian izin fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi UMOT sesuai dengan standar dan persyaratan.

## 3. Indikator Keluaran

Data perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi UMOT yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan.

## 4. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai

- a. Belanja kegiatan rapat dalam rangka koordinasi lintas sektor;
- b. Belanja konsumsi kegiatan rapat;

- c. Belanja pencetakan blangko-blangko Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
- d. Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana di dalam kabupaten/kota (termasuk didalamnya uang saku, uang makan dan minum dalam rangka perjalanan pengawasan sebagaimana diatur dalam standar biaya daerah).

5. Pelaksanaan Kegiatan

a. Inputan Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, dan Sarana Produksi UMOT Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah Daerah merupakan kegiatan dengan input sebagai berikut:

- 1) Database sarana berizin yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) *Tools* pengawasan izin sesuai dengan standar dan persyaratan untuk fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dengan format BAP sesuai Formulir II.3 dan *tools* pengawasan izin sarana produksi UMOT, untuk UMOT yang telah memiliki sertifikat CPOTB Bertahap Tahap I dengan format sesuai Formulir II.4 serta untuk UMOT yang telah memiliki sertifikat CPOTB Bertahap Tahap II dengan format sesuai Formulir II.5.

b. Metode Kerja

Kegiatan ini terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan/pemeriksaan izin Apotek, Toko Obat, dan/atau sarana produksi UMOT dapat dilakukan selama bulan Januari s/d Desember 2021 di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Target pengawasan adalah minimal sejumlah target pada Berita Acara Kesepakatan. Untuk kabupaten/kota yang di wilayahnya tidak memiliki sarana UMOT, maka keseluruhan target pengawasan/pemeriksaan dilakukan terhadap izin Apotek dan Toko Obat. Untuk wilayah yang memiliki sarana UMOT, maka keseluruhan target pengawasan perizinan dilakukan dengan komposisi

minimal 33 sarana Apotek dan Toko Obat dan maksimal tiga sarana UMOT (atau sejumlah sarana UMOT jika kurang dari tiga). Penambahan pengawasan/pemeriksaan terhadap sarana UMOT dapat dilakukan jika telah melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap minimal 36 sarana Apotek dan Toko Obat.

- 2) Rapat koordinasi bersama lintas sektor (Balai Besar/Balai/Loka POM, PTSP, IAI, PAFI, GP Jamu dll.) dalam rangka persiapan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan izin sarana sesuai dengan kewenangan masing-masing.

c. Petugas pemeriksa

Pengawasan dilakukan oleh Petugas Pengawas yang kompeten dengan membawa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jumlah petugas dapat disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah dengan mempertimbangkan pencapaian output yang efektif dan efisien. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Ceklis Pemeriksaan (BAP) sesuai Formulir II.3 untuk Apotek dan Toko Obat atau Formulir II.4 untuk UMOT yang memiliki sertifikat CPOTB Tahap I atau Formulir II.5 untuk UMOT yang memiliki sertifikat CPOTB Tahap II. Jika diperlukan, Petugas Pengawas dapat mengajukan pertanyaan untuk memperkuat hasil observasi. Petugas Pengawas juga disarankan mencatat sendiri hal-hal lain yang ditemukan selama pemeriksaan. Hasil pemeriksaan selanjutnya direkap sesuai dengan Formulir II.6. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian atau Formulir II.7 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Izin UMOT.

6. Pelaporan

Pelaporan kegiatan penyediaan data dan pengelolaan perizinan menggunakan formulir;

- a. Formulir II.6 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; dan/atau
- b. Formulir II.7 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Izin UMOT.



**C. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh IRT**

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan telah dinyatakan pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan pangan yang beredar. Terkait pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (IRT), diamanahkan bahwa Pemerintah di tingkat daerah Kabupaten /Kota memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin produksi dan pengawasan produk IRT yang beredar. Sehubungan dengan hal tersebut, BPOM telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengawasan IRT seperti Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan, dan Tata Cara Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga.

Hingga saat ini, telah banyak industri skala kecil hingga skala menengah yang terdaftar sebagai IRT dengan nomor pangan industri rumah tangga. Namun, berdasarkan hasil pengawasan dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh BPOM masih banyak ditemukan pemberian SPP-IRT yang belum memenuhi ketentuan seperti pelaku usaha wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai minimal 60, sarana produksi pangan diperiksa dengan hasil pemeriksaan tergolong level I dan II serta jenis pangan yang didaftarkan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan.

Dari kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan SPP-IRT antara lain komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pemberian SPP-IRT (misalnya

adanya Peraturan Daerah yang jelas terkait kemudahan pelayanan perizinan), ketersediaan tenaga PKP dan *DFI* yang kompeten, adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait, akses transportasi yang mudah ke lokasi IRTP serta ketersediaan anggaran baik dalam pengawasan *pre-market* dan *post-market*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan produksi dan peredaran pangan industri rumah tangga serta untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, maka dipandang perlu memberikan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP.

## 2. Tujuan

- a. Agar pangan olahan yang diproduksi oleh IRTP memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-unangan yang berlaku; dan
- b. Meningkatkan keamanan dan mutu produk IRTP yang akan beredar di masyarakat melalui peningkatan efektivitas pengawasan *pre-market* pangan industri rumah tangga sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.

## 3. Indikator Keluaran

- a. Jumlah pelaku usaha IRTP yang diberikan bimbingan teknis;
- b. Jumlah sarana IRTP yang diawasi dalam rangka penerbitan SPP IRT; dan
- c. Jumlah dokumen kajian sertifikat produksi.

## 4. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai

- a. Belanja kegiatan pelaksanaan bimtek seperti biaya konsumsi, uang harian dan transport, atau biaya paket data bagi peserta jika dilakukan secara *online*;

- b. Belanja pencetakan modul dan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP);
  - c. Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli (hanya bagi narasumber yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber diluar fungsi ASN);
  - d. Belanja material pendukung bimtek seperti spanduk, seminar kit dan sertifikat;
  - e. Belanja sewa gedung/ruang dan perlengkapannya;
  - f. Belanja perjalanan dinas pengawasan *pre-market* di dalam kabupaten/kota (termasuk didalamnya uang saku, uang makan dan minum dalam rangka perjalanan pengawasan sebagaimana diatur dalam standar biaya daerah);
  - g. Belanja pencetakan blangko-blangko pengawasan, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status/ *Corrective and Preventive Actions (CAPA)*;
  - h. Belanja kegiatan rapat penerbitan izin dan pengkajian ulang sertifikat bersama lintas sektor; dan
  - i. Belanja konsumsi kegiatan rapat.
5. Pelaksanaan Kegiatan
- a. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan  
Pelaksanaan bimtek atau penyuluhan keamanan pangan mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Penyuluhan keamanan pangan diprioritaskan bagi pemilik atau penanggung jawab IRTP yang belum pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Jumlah peserta adalah minimal sejumlah target peserta yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.
    - 1) Narasumber  
Narasumber pada penyuluhan ini adalah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan PKP/DFI yang sudah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau UPT BPOM setempat atau dari instansi lembaga lain yang kompeten di bidangnya.
    - 2) Materi

Materi Bimtek terdiri dari materi utama/wajib dan materi pendukung.

Materi utama atau materi wajib yang disampaikan adalah:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
- b) Keamanan dan Mutu Pangan
- c) Teknologi proses pengolahan pangan
- d) SSOP (*Standard Sanitation Operating Procedure*)
- e) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan
- f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan
- g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan

Materi pendukung yang disampaikan adalah:

- a) Pencantuman Label Halal
  - b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
- 3) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan
- Materi penyuluhan keamanan pangan dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.
- 4) Pemberian Modul dan Produk Informasi Keamanan Pangan
- Peserta Bimtek dapat diberikan modul yang berisi materi Bimtek dan/ atau produk informasi yang berupa poster, leaflet atau yang sejenis yang berisi materi keamanan pangan
- 5) Tempat
- Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan harus mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Prasarana pelatihan dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan dijangkau peserta serta efisiensi dana dan kualitas pelatihan. Penggunaan sewa

gedung dimungkinkan apabila peserta Bimtek minimal 40 orang.

- 6) Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan  
Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

b. Pengawasan Dalam Rangka Penerbitan SPP-IRT

Pelaksanaan Pengawasan *Pre-Market* terhadap Sarana IRTP dilakukan kepada sarana yang telah mengikuti bimtek penyuluhan keamanan pangan dan mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebelum diterbitkan SPP-IRT. Jumlah minimal sarana yang diperiksa adalah minimal sejumlah sarana yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan atau sesuai jumlah sarana yang mengajukan SPP-IRT.

Pemeriksaan sarana dilakukan oleh tim yang terdiri dari maksimal 3 orang *DFI* dan/atau PKP. Apabila belum tersedia *DFI* atau PKP dapat dilakukan oleh PNS yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pangan atau sanitarian dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun kepala Puskesmas yang telah didelegasikan wewenang penugasan pengawasan oleh kepala Dinas Kesehatan. Pemeriksaan dapat didampingi oleh petugas UPT BPOM setempat atau Dinas PM-PTSP, dan dinas lain yang terkait dengan IRTP.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan sarana produksi IRTP dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012.
- 2) Selama pemeriksaan, Tenaga Pengawas Pangan didampingi oleh penanggungjawab IRTP yang diperiksa.

- 3) Dokumen yang perlu disiapkan adalah:
- Berita Acara Pemeriksaan (Formulir II.8);
  - Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP (Formulir II.9);
  - Formulir Rincian Laporan Ketidaksesuaian (Formulir II.10); dan
  - Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status (Formulir II.11).
- 4) Petunjuk Pengisian Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP (Formulir II.9) yaitu:
- Jika elemen yang diperiksa memenuhi persyaratan CPPB-IRT, maka kolom ketidaksesuaian tidak diisi atau dibiarkan kosong.
  - Jika elemen yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan CPPB-IRT, atau kondisi IRTP sesuai dengan kalimat pernyataan negatif pada elemen yang diperiksa, maka menjadi temuan ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan CPPB-IRT (minor, major, serius atau kritis) dengan memberi tanda “√” di kotak yang telah disediakan.

Contoh :

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN			
		MI	MA	SE	KR
A	<b>LOKASI dan LINGKUNGAN PRODUKSI</b>				
1	Lokasi IRTP <b>kotor</b> dan berdebu			<input type="checkbox"/>	
2	Lingkungan IRTP <b>tidak terawat</b> , kotor dan berdebu			<input checked="" type="checkbox"/>	
B	<b>BANGUNAN DAN FASILITAS</b>				
3	Ruang produksi <b>sempit</b> , sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk lain selain pangan		<input checked="" type="checkbox"/>		

↑  
Nomor

↑  
Elemen yang diperiksa

↑  
Kolom penetapan Ketidaksesuaian

Kotak tempat pengisian tanda “√” jika terdapat ketidaksesuaian

- 5) Jika diperlukan, tenaga pengawas dapat mengajukan pertanyaan serta melakukan pemeriksaan secara mendalam dan rinci untuk memperkuat penilaian. Disamping menggunakan formulir pemeriksaan, tenaga pengawas juga disarankan mencatat sendiri hal-hal khusus yang

ditemukan selama pemeriksaan yang penting artinya bagi penilaian.

- 6) Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka IRTP diberi kesempatan untuk melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian dan mendokumentasikannya dengan menggunakan Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status/*CAPA* (Formulir II.11).
- 7) Tenaga pengawas pangan agar melakukan verifikasi terhadap tindakan koreksi yang dilakukan oleh IRTP. Jika tindakan koreksi yang dilakukan sudah tepat, maka pengawas dapat menuliskan “sesuai” pada kolom “status”. Verifikasi tindak lanjut agar dicatat dan didokumentasikan dengan baik.
- 8) Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan level I atau II dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

c. Pengkajian ulang

Pengkajian dilakukan dalam bentuk rapat di dalam kantor yang diikuti oleh petugas Dinas Kesehatan, *DFI*, Tenaga Pengawas Pangan atau Penyuluh Keamanan Pangan serta perwakilan Dinas PM-PTSP dan dinas lain yang terkait dengan IRTP. Rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengkaji SPP-IRT yang telah dikeluarkan sebelumnya. Output pada kegiatan kaji ulang adalah dokumen atau laporan hasil kaji ulang sesuai dengan rapat kaji ulang yang dilakukan.

Pengkajian dilakukan berdasarkan:

- 1) *track record* IRTP, kasus, dan status IRTP (aktif/ tidak aktif) ditindaklanjuti dengan pencabutan SPP-IRTnya;
- 2) kesesuaian kondisi IRTP saat ini dengan definisi IRTP yang seharusnya. IRTP yang sudah berkembang perlu difasilitasi untuk mendaftarkan produknya memperoleh izin edar MD dari BPOM; dan

- 3) Masa berlaku SPP-IRT yang akan berakhir ditindaklanjuti dengan perpanjangan SPP-IRT.

#### 6. Pelaporan

Pelaporan kegiatan pengendalian dan pengawasan SPP-IRT menggunakan formulir;

- a. Formulir II.12 Rekap Laporan Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan.
- b. Formulir II.13 Rekapitulasi Hasil Pengawasan PIRT *Pre-Market*.
- c. Formulir II.14 Rekap Hasil Kaji Ulang Dalam Rangka Pengawasan *Pre-Market*.

### **D. Pemeriksaan *Post-Market* Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan**

#### 1. Latar Belakang

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Mengingat potensi ekonomi yang sangat strategis serta potensi risiko produk maka perlu diselaraskan antara pertumbuhan IRTP yang cepat dengan peningkatan keamanan dan mutu produk. Pengawasan terkait aspek keamanan dan mutu pangan industri rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana BPOM melakukan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan untuk pangan olahan, termasuk pangan industri rumah tangga.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dinyatakan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk pangan olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau Bupati/Wali kota secara sendiri atau bersama-sama. BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan



Makanan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengembangkan kebijakan/regulasi/standar/pedoman pengawasan pangan olahan termasuk PIRT.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan *post-market* IRTP. Namun pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum optimal, salah satunya dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik SDM, laboratorium, dan anggaran. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil pengawasan IRTP tahun 2017-2019 yang dilakukan oleh UPT BPOM menunjukkan IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berturut-turut tahun 2017-2019 sebesar 84,09%; 83,04%; dan 73,48%. Demikian juga hasil sampling PIRT oleh UPT BPOM tahun 2017-2019 menunjukkan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 23,4%; 22,1%; dan 24,26 %. Selanjutnya pada tahun 2019 dari 6.414 rekomendasi pengawasan obat dan makanan yang disampaikan UPT BPOM kepada Pemerintah Daerah, hanya 2.341 (36,5%) yang ditindaklanjuti.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan IRTP sesuai dengan kebijakan/regulasi/standar/pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga yang telah ditetapkan BPOM. Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka kegiatan Pemeriksaan *Post-Market* pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan menjadi penting dan strategis untuk tersedia kembali pada menu DAK Nonfisik POM Tahun Anggaran 2021.

2. Tujuan
  - a. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan *post-market* IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman.
  - b. Meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.
  
3. Indikator Keluaran
  - a. Jumlah laporan inventarisasi sarana;
  - b. Jumlah sarana pangan industri rumah tangga yang diawasi dalam rangka pengawasan *post-market*;
  - c. Jumlah sampel yang diuji; dan
  - d. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi.
  
4. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
  - a. Belanja konsumsi kegiatan rapat;
  - b. Belanja kegiatan rapat inventarisasi bersama lintas sektor;
  - c. Belanja kegiatan rapat evaluasi bersama lintas sektor;
  - d. Belanja sewa ruang pertemuan (hanya jika diperlukan);
  - e. Belanja perjalanan dinas pengawasan *post-market* di dalam kabupaten (termasuk didalamnya uang saku, uang makan dan minum dalam rangka perjalanan pengawasan sebagaimana diatur dalam standar biaya daerah);
  - f. Belanja pembelian sampel;
  - g. Belanja jasa pengiriman sampel (Dapat dilakukan dengan belanja perjalanan dinas pengiriman sampel dengan prinsip hanya jika diperlukan dan terbatas); dan
  - h. Belanja jasa pengujian sampel.
  
5. Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Inventarisasi Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)  
Inventarisasi dilakukan dalam bentuk rapat yang diikuti petugas Dinas Kesehatan, DFI, Tenaga Pengawas Pangan atau Penyuluh Keamanan Pangan dengan beberapa lintas sektor yaitu Dinas PM-PTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah kabupaten/kota

setempat, ataupun instansi terkait lainnya. Inventarisasi ini dilakukan untuk melakukan pembahasan data terhadap sarana IRTP yang terdapat diwilayah tersebut yang akan dilakukan audit. Inventarisasi dilakukan berdasarkan *track record* IRTP, kasus, dan status IRTP (aktif/ tidak aktif).

Kegiatan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun (di semester pertama) untuk menentukan sarana IRTP yang akan dilakukan audit dalam rangka pengawasan *post-market* serta pemetaan sarana IRTP dan produk pangan industri rumah tangga di kabupaten/kota.

b. Pengawasan Sarana Produksi IRTP

Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terhadap sarana produksi IRTP yang telah mendapatkan SPP-IRT. Jumlah sarana yang diperiksa adalah minimal sejumlah sarana yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan tata cara sebagaimana telah diatur pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga.

c. Sampling dan Pengujian Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Sasaran tempat pelaksanaan sampling produk pangan industri rumah tangga yaitu di sarana distribusi pangan meliputi gudang distributor, *hypermarket*, supermarket/swalayan, toko, warung, kantin sekolah dan kantin/warung/toko di sekitar sekolah, kios, pasar tradisional, apotik, toko obat, dan lain-lain. Jumlah pengadaan/pembelian dan pengujian sampel adalah minimal sejumlah sampel yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.

Pengadaan/pembelian sampel dapat dilakukan saat pelaksanaan kegiatan perjalanan pengawasan, baik saat pengawasan *pre-market* dalam rangka penerbitan (SPP-IRT) maupun saat pengawasan sarana *post-market*. Sampling dan pengujian dapat dilakukan terhadap jenis pangan dengan kriteria:

- 1) Produk pangan industri rumah tangga terdaftar yang diproduksi dan beredar di kabupaten/kota tersebut, termasuk produk PIRT dengan kategori perizinan Makanan Dalam Negeri (MD) yang kewenangan perizinannya melalui BPOM maupun produk pangan industri rumah tangga yang akan berproses memperoleh izin edar MD dari BPOM;
- 2) Produk pangan industri rumah tangga terdaftar yang diproduksi dari luar kabupaten/kota namun beredar dalam wilayah kabupaten/kota tersebut;
- 3) Produk pangan industri rumah tangga unggulan daerah;
- 4) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) maksimal 20% dengan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan BPOM. Jika terdapat kebijakan terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dikarenakan kondisi pandemi *Covid-19*, maka pelaksanaan sampling PJAS dapat dilakukan di sarana penjualan PJAS yang berlokasi di sekitar sekolah
- 5) Pangan siap saji tertentu maksimal 20% yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dalam rangka mendukung Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Khusus pelaksanaan sampling dan uji untuk produk pangan industri rumah tangga yang izin edarnya seharusnya berubah menjadi izin edar MD, hasil uji digunakan untuk dasar pembinaan pelaku usaha dan pendampingan sehingga IRTP tersebut dapat memenuhi syarat terdaftar sebagai MD. Oleh karena itu, parameter ujinya dapat disesuaikan untuk tujuan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan registrasi MD.

Selain sampling dan pengujian pada kegiatan pengawasan dalam rangka *post-market*, juga dilakukan pengawasan terhadap iklan produk pangan industri rumah tangga, baik itu di media cetak, media luar ruangan, maupun elektronik di wilayah kerja masing-masing kabupaten/kota. Pengawasan iklan produk PIRT tersebut dilakukan dengan menilai kesesuaian iklan terhadap peraturan. Pelaksanaan sampling dan pengujian agar mengacu

pada skema sebagaimana tergambar pada Anak Lampiran II.1. Skema Sampling dan Pengujian

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian saat pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan sampling dilengkapi dengan survei awal produk pangan industri rumah tangga yang banyak beredar dan/atau dikonsumsi atau menjadi trend di kabupaten/kota tersebut.
- 2) Pengambilan sampling dilakukan secara acak/random terhadap produk pangan.
- 3) Setiap sampel dicatat dengan pemberian kode identitas berupa nomor sampel, tanggal sampling, dan lokasi sampling.
- 4) Sampel yang diambil harus memiliki kode produksi/nomor *batch* yang sama setiap nomornya. Apabila pada kemasan tidak ada nomor kode produksi/nomor *batch* pada produknya, dapat mengambil sampel produk dengan tanggal kadaluarsa yang sama untuk setiap satu nomor produk.
- 5) Untuk sampel yang akan diuji mikrobiologi, agar memperhatikan penanganan dan penyerahan sampel ke laboratorium. Sampel memiliki kode dan identitas yang jelas serta dikemas dengan baik sehingga terhindar dari pencemaran luar.
- 6) Untuk sampel yang mudah rusak dan tidak dibekukan, segera dinginkan unit hingga suhu 0 – 8°C dan pertahankan suhu selama pengangkutan (misalnya menggunakan *cooling box* dengan ditambah *ice gel*)
- 7) Kebutuhan Sampel Pengujian

Kebutuhan sampel pengujian adalah sesuai tabel berikut:

No	Jenis Pangan	Jumlah kebutuhan sampel	
		Uji Kimia	Uji Mikrobiologi
1.	Sediaan cair, contoh: cuka, sirup dll	6 kemasan @ minimal 100 ml	6 x kemasan @ minimal 100 ml

No	Jenis Pangan	Jumlah kebutuhan sampel	
		Uji Kimia	Uji Mikrobiologi
2.	Sediaan padatan, contoh: bumbu, keripik, roti, olahan ikan, dll	6 kemasan @ minimal 100 g	6 x kemasan @ minimal 100 g

#### 8) Pengujian Sampel

Pengujian dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi sampel yang mencakup label (jika ada), legalitas produk, masa kedaluwarsa produk dan kondisi produk (rusak/berkarat/dsb). Pengujian sampel mengacu pada parameter uji yang dipilih berdasarkan faktor risiko. Pengujian sampel dapat dilakukan di laboratorium pemerintah maupun laboratorium swasta lainnya yang terakreditasi. Sebagai upaya mendukung pengembangan kemampuan uji laboratorium di daerah, maka pengujian lebih disarankan untuk dilakukan di luar laboratorium UPT BPOM. Pengujian sampel mengacu pada persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan BPOM meliputi parameter uji kimia (bahan dilarang, cemaran logam berat, serta kadar Bahan Tambah Pangan/BTP), dan parameter uji mikrobiologi sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran II.2. Parameter uji ditentukan berdasarkan faktor risiko dan faktor prioritas pengujian pada sampel yang diuji.

#### d. Monitoring dan Tindak Lanjut Pengawasan Sarana IRTP

Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat dengan lintas sektor terkait yaitu seperti Dinas PM-PTSP, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, UPT BPOM serta instansi terkait lainnya di wilayah kabupaten/kota.

Materi yang akan dibahas terkait hasil pemeriksaan *post-market* (audit dan pengujian) dan melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan tersebut. Pada kegiatan ini dilakukan juga evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik POM yang berlangsung di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dalam bentuk rapat semester dengan hasil dalam bentuk dokumen laporan semester yang akan dilaporkan ke lintas sektor terkait termasuk BPOM. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi setidaknya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun berjalan.

6. Pelaporan

Pelaporan kegiatan *Post-Market* Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga menggunakan formulir:

- a. Formulir II.15 Inventarisasi pangan industri rumah tangga Dalam Rangka Pengawasan *Post-Market*;
- b. Formulir II.16 Rekapitulasi Hasil Pengawasan PIRT *Post-Market*;
- c. Formulir II.17 Rekapitulasi Laporan Iklan Produk Pangan;
- d. Formulir II.18 Rekapitulasi Hasil Sampling dan Pengujian; dan
- e. Formulir II.19 Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengawasan *Post-Market*.

**E. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Latar Belakang

BPOM melaksanakan pengawasan *pre-market* dan *post-market* pada makanan yang beredar di masyarakat. Untuk pengawasan *pre-market* dilakukan melalui penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan. Sedangkan untuk pengawasan *post-market*, dengan sampling dan pengujian laboratorium serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan fokus agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 khususnya terkait agenda meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sebagai pelaksanaan amanat salah satu Misi Presiden 2019-

2024 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai implikasi luas terhadap kesehatan masyarakat. Adanya tantangan globalisasi yang mempengaruhi sistem perdagangan di Indonesia, mendorong perlunya peningkatan perlindungan masyarakat sebagai konsumen makanan dari risiko/ancaman peredaran produk yang tidak memenuhi syarat.

B POM menyadari bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pengawasan makanan yang beredar perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan terciptanya konsumen cerdas yang dapat melindungi dirinya sendiri, keluarga, maupun komunitas masyarakat dari ancaman produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu, pengawasan berbasis risiko oleh B POM baik di pusat maupun di seluruh wilayah kerja UPT B POM difokuskan pada strategi preventif, dengan mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan *Risk Management Program* oleh pelaku usaha dan verifikasi oleh regulator, serta melalui pelaksanaan strategi komunikasi risiko. Salah satu bentuk nyata strategi ini adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai lintas sektor yang menjadi mitra B POM.

Dalam mengembangkan komunikasi risiko dibutuhkan peran lintas sektor yang bisa menjangkau penerima manfaat yang ditargetkan yaitu masyarakat dan komunitas masyarakat. Peran serta lintas sektor dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dekat dengan masyarakat akan semakin meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat hingga titik-titik kabupaten/kota.

## 2. Tujuan

- a. Penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai makanan aman, bermutu dan bermanfaat;
- b. Peningkatan peran serta berbagai pihak di kabupaten/kota dalam pengawasan makanan yang beredar di masyarakat; dan



- c. Pembentukan kader atau duta pengawasan pangan yang berasal dari PKK, Posyandu, komunitas pasar, komunitas desa, karang taruna, LSM, dan lain- lain.
3. Indikator Keluaran

Jumlah masyarakat/peserta yang mendapatkan informasi dan/atau materi edukasi.
4. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
  - a. Belanja kegiatan pelaksanaan KIE seperti biaya konsumsi, uang harian dan transport, atau biaya paket data bagi peserta jika dilakukan secara *online*;
  - b. Belanja perjalanan dinas pelaksanaan KIE di dalam kabupaten/kota (termasuk didalamnya uang saku, uang makan dan minum dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam standar biaya daerah);
  - c. Belanja pembuatan/pencetakan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP) atau produk informasi lainnya seperti banner dan leaflet;
  - d. Belanja material pendukung KIE seperti spanduk, seminar kit dan sertifikat;
  - e. Belanja sewa gedung dan perlengkapannya; dan
  - f. Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli (hanya diberikan bagi narasumber yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber di luar fungsi ASN).
5. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat melindungi dirinya dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan mengerti akan pentingnya keamanan pangan. Pelaksanaan KIE tidak digunakan untuk kepentingan pribadi/ kelompok ataupun agenda tersembunyi lainnya. Target peserta KIE adalah sesuai target peserta yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan, dan dapat dilaksanakan dengan frekuensi yang sesuai dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di wilayah masing-masing.

  - a. Perencanaan

- 1) Program KIE direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Perencanaan meliputi tempat dan waktu pelaksanaan, pemilihan narasumber, penetapan sasaran/peserta KIE serta materi yang sesuai.
  - 3) Peserta yang akan mengikuti kegiatan KIE didapatkan dari data Dinas Kesehatan kabupaten/kota berdasarkan target peserta yaitu:
    - a) Penyuluhan langsung kepada masyarakat umum dalam rangka edukasi (karyawan, ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan lain-lain); dan
    - b) Penyuluhan langsung kepada komunitas (pelaku usaha PIRT/UMKM, anggota SAKA PRAMUKA, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Komunitas Pasar, Karang Taruna, LSM, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan analisis wilayah target operasional KIE seperti daerah yang banyak memiliki sarana IRTP, sentra oleh-oleh, kurang terpapar informasi, daerah terpencil, serta daerah yang banyak potensi kasus terkait keamanan pangan.
  - 4) Dalam pelaksanaan program tersebut, tidak diperkenankan menggunakan simbol/atribut/lambang atau sejenisnya yang menggambarkan organisasi politik.
- b. Pelaksanaan kegiatan
- 1) Peserta kegiatan secara keseluruhan adalah minimal sejumlah peserta yang telah tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.
  - 2) Pelaksanaan penyebaran informasi juga dapat diberikan melalui radio/TV lokal, maupun pembuatan video kemandirian pangan lain.
  - 3) Dalam pelaksanaan kegiatan harus memegang teguh prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan.
  - 4) Selama pelaksanaan kegiatan KIE berlangsung, setiap narasumber tidak diperkenankan untuk mengkampanyekan salah satu calon presiden/wakil presiden, kepala/wakil kepala daerah, partai politik

tertentu, dan/atau calon legislatif tertentu dan tidak diperkenankan memasang spanduk/umbul-umbul dan atribut partai.

- 5) Souvenir/*goody bag*/seminar kit dapat diberikan dengan prinsip efektif efisien dan diutamakan berupa materi yang dapat memberikan edukasi keamanan Obat dan Makanan.
- 6) Pemberian souvenir/*goody bag* oleh siapapun selain dari panitia KIE kepada para peserta tidak diperkenankan selama KIE berlangsung.

c. Narasumber

Narasumber harus kompeten di bidang keamanan pangan, dapat berasal dari Universitas, Dinas Kesehatan, UPT BPOM, BPOM maupun Lembaga lain yang kompeten. Pembayaran honorarium narasumber harus memenuhi aturan pembiayaan DAK Nonfisik POM yaitu hanya dapat diberikan bagi narasumber yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber diluar fungsi ASN.

d. Materi

Materi yang disampaikan adalah materi keamanan pangan, namun dapat diperluas dengan materi terkait keamanan penggunaan Obat atau materi edukasi kesehatan lainnya.

e. Pemberian Materi KIE dan Produk Informasi

Peserta KIE dapat diberikan materi KIE dan/atau produk informasi yang berupa poster, leaflet, billboard, talkshow atau media edukasi lainnya yang terkait materi keamanan pangan, penggunaan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik atau materi edukasi kesehatan lainnya. Contoh-contoh materi KIE dan Produk Informasi dapat dilihat pada [bit.ly/KIEDanPIKPBpom](https://bit.ly/KIEDanPIKPBpom). Logo BPOM harus tetap dicantumkan jika menggunakan desain materi PIKP yang disediakan oleh BPOM.

f. Tempat

Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam KIE harus mendukung terlaksananya kegiatan. Prasarana KIE dapat menyewa gedung atau menggunakan gedung milik pemerintah yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan, kualitas KIE, efisiensi anggaran dan kemudahan jangkauan oleh peserta.

6. Pelaporan

Pelaporan kegiatan KIE menggunakan Formulir II.20 Rekap Laporan Kegiatan KIE.

Formulir II.1

**REKAP LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIK TENAGA KEFARMASIAN  
DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN  
DALAM PEMENUHAN STANDAR DAN PERSYARATAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta Bimbingan Teknis				Alamat Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
		Nama Peserta	Jabatan	No Hp	Penanggung Jawab / Pemilik Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,  
ttd.  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.2

**REKAP LAPORAN KEGIATAN PELATIHAN DFI DAN ATAU PKP****BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
 PROVINSI :

No	Tanggal Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Peserta Pelatihan				No telp/Email
			Nama Peserta	NIP	Pangkat/Jabatan	Nama Unit	

Keterangan:

Tempat, Tanggal Pengesahan  
 Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.3

**CEKLIS PEMERIKSAAN**  
**IZIN OPERASIONAL FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN**  
**TAHUN 2021**

<b>PELAKSANAAN</b>	
1.	Hari/Tanggal Pemeriksaan :
2.	Petugas Pemeriksa
	a. Nama Petugas :
	Jabatan :
	Instansi :
	b. Nama Petugas :
	Jabatan :
	Instansi :
<b>INFORMASI SARANA</b>	
1.	Nama Sarana :
2.	Alamat Sarana (alamat fisik)
	Alamat :
	Kelurahan/Desa :
	Kecamatan :
	Kode Pos :
	Kabupaten/Kota :
	Provinsi :
3.	Izin Sarana
	Nomor Izin Sarana :
	Tanggal Terbit Izin :
	Tanggal Berlaku Izin :
4.	Nama Penanggung Jawab Sarana :
5.	a. Nomor SIPA/SIPTTK :
	b. Tanggal Terbit SIPA/SIPTTK :
	c. Tanggal Berlaku SIPA/SIPTTK :

6.	Nomor STRA/STRITK	:
7.	NPWP Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	:
8.	Nama Pemilik Sarana	:
9.	Nomor Telepon/Hp. Sarana	:
10.	Alamat email sarana	:
<b>ASPEK PEMERIKSAAN</b>		
<i>(Jawablah pertanyaan sesuai dengan hasil observasi!)</i>		
<b>PERIZINAN</b>		
1.	Apakah izin operasional Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih berlaku?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
2.	Apakah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih beroperasi?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih " <b>Tidak</b> " sebutkan alasannya:	
3.	Apakah alamat/lokasi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih sesuai dengan Surat Izin Operasionalnya?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih " <b>Tidak</b> " sebutkan alasannya:	
4.	Apakah SIPA/SIPTK Penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih berlaku?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih " <b>Tidak</b> " sebutkan alasannya:	
<b>PERSONALIA</b>		
1.	Apakah Penanggungjawab sarana (Apoteker/TTK) masih bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan SIPA/SIPTK?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih " <b>Tidak</b> " sebutkan alasannya:	



2.	Apakah Apoteker/TTK penanggungjawab juga bekerja di tempat lain?
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
	Jika memilih <b>"Ya"</b> sebutkan dimana:
3.	Apakah di Apotek juga tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian?
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
<b>BANGUNAN DAN SARANA PRASARANA</b>	
1.	Apakah ruang penyimpanan obat cukup memadai serta tersedia lemari dan/atau rak untuk menyimpan obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
2.	Apakah tersedia pendingin ruangan dan alat pengukur suhu (termometer) di ruang penyimpanan obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
3.	Apakah bangunan fasilitas pelayanan kefarmasian sudah memperhatikan keamanan dalam penyimpanan obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
4.	Apakah bangunan fasilitas pelayanan kefarmasian sudah dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup terang sehingga menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi praktik kefarmasian?
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
5.	Apakah di <b>Apotek</b> tersedia lemari khusus penyimpanan Narkotika dan/atau Psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (berkunci ganda, kuat dan tidak mudah dipindahkan)?*
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
6.	Apakah di <b>Apotek</b> sudah tersedia blanko etiket untuk penyerahan obat resep?
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
7.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sudah tersedia blanko surat pesanan untuk pengadaan obat, blanko kartu stok/buku pencatatan mutasi obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Tidak</span>
8.	Apakah penyimpanan obat sudah dilengkapi dengan kartu stok (manual dan/atau elektronik) yang sudah mencantumkan informasi nomor bets

	dan tanggal kedaluwarsa obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
9.	Jika fasilitas pelayanan kefarmasian menyimpan produk rantai dingin ( <i>Cold Chain Product /CCP</i> ), apakah fasilitas pelayanan kefarmasian sudah memiliki lemari pendingin ( <i>refrigerator</i> ) untuk menyimpan CCP sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Sarana tidak memiliki CCP
10.	Apakah obat yang dijual oleh fasilitas pelayanan kefarmasian adalah obat yang memiliki Nomor Izin Edar dari BPOM? (sampling 10 obat keras <i>fast moving</i> dan cek melalui <a href="https://cekbpom.pom.go.id/">https://cekbpom.pom.go.id/</a> dan/atau Aplikasi BPOM Mobile)
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika menjawab “ <b>Ya</b> ”, sebutkan nama produk dan zat aktif obat:
11.	Apakah ditemukan obat kedaluwarsa dan/atau rusak?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika menjawab “ <b>Ya</b> ”, sebutkan nama obat dan jenis kerusakan dimaksud:
12.	Apakah obat kedaluwarsa dan/atau rusak yang ditemukan, telah dipisahkan dari obat layak jual, diinventarisir, disimpan dalam tempat terpisah, terkunci dan dilengkapi penandaan yang memadai?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
13.	Apakah <b>Toko Obat</b> mengelola golongan obat Keras/Narkotika?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
14.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersedia buku/referensi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelayanan kefarmasian?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
15.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersedia sarana prasarana penunjang berikut?
	<input type="checkbox"/> listrik yang memadai <input type="checkbox"/> Air bersih (PDAM/Sumur)
16.	Apakah fasilitas pelayanan kefarmasian melakukan kegiatan di luar fungsinya, misal melakukan kegiatan produksi dan/atau

	distribusi/penyaluran obat?
<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
<b>CATATAN PETUGAS</b> <i>(Catatan diisi oleh Petugas Pemeriksa apabila ada hal lain yang perlu dilaporkan)</i>	

Terhadap keseluruhan ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan/pemenuhan kesesuaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Demikian hasil pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

Pihak Sarana

Pemeriksa,

1. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

1. (Tanda tangan, nama lengkap)

2. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

2. (Tanda tangan, nama lengkap)

## Formulir II.4

**DAFTAR PERIKSA UNTUK UMOT TAHAP I****A. Informasi Umum**

1. Kebenaran alamat sesuai *database*/dokumen legal
2. Nama pemilik dan penanggungjawab (termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi)
3. Dokumen terkait izin yang dimiliki
4. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap yang dimiliki
5. Jumlah izin edar yang dimiliki
  - a. Jumlah produk yang diproduksi
  - b. Produk yang tidak diproduksi dalam 1 atau 2 tahun terakhir
6. Sumber perolehan bahan awal/ bahan aktif obat tradisional (BAOT)

**B. Penerapan CPOTB****Higiene dan Sanitasi**

No	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/Catatan
1.	Ruangan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan Obat Tradisional dalam keadaan bersih	
2.	Memiliki program, prosedur sanitasi ruangan dan peralatan	
3.	Setiap aktifitas sanitasi ruangan dan peralatan dicatat	
4.	Personil yang terlibat dalam pembuatan Obat Tradisional dalam keadaan sehat	
5.	Personil yang terlibat dalam pembuatan Obat Tradisional terlatih/ memahami cara pembuatan Obat Tradisional termasuk aspek higiene dan sanitasi	
6.	Personil dalam keadaan bersih	

No	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/Catatan
	ketika memasuki ruang produksi dan selama bekerja di ruang produksi - Cuci tangan sebelum memasuki area produksi dan setelah keluar dari toilet	
7.	Personil menggunakan pakaian kerja/ pelindung yang bersih ketika bekerja di area produksi	
8.	Sampah produksi tidak ditumpuk dalam waktu yang lama dan adanya program/ tindakan yang mencegah munculnya hama/ pest yang dapat mengontaminasi produk	

Demikian hasil pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

Pihak Sarana

Pemeriksa,

1. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

1. (Tanda tangan, nama lengkap)

2. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

2. (Tanda tangan, nama lengkap)

## Formulir II.5

**DAFTAR PERIKSA UNTUK UMOT TAHAP II****A. Informasi Umum**

1. Kebenaran alamat sesuai *database*/dokumen legal
2. Nama pemilik dan penanggungjawab (termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi)
3. Dokumen terkait izin yang dimiliki
4. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap yang dimiliki
5. Jumlah izin edar yang dimiliki
  - Jumlah produk yang diproduksi
  - Produk yang tidak diproduksi dalam 1 atau 2 tahun terakhir
6. Sumber perolehan bahan awal/bahan aktif obat tradisional (BAOT)

**B. Penerapan CPOTB****Higiene dan Sanitasi**

No	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/Catatan
1.	Ruangan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan Obat Tradisional dalam keadaan bersih	
2.	Memiliki program, prosedur sanitasi ruangan dan peralatan	
3.	Setiap aktifitas sanitasi ruangan dan peralatan dicatat	
4.	Personil yang terlibat dalam pembuatan Obat Tradisional dalam keadaan sehat	
5.	Personil yang terlibat dalam pembuatan Obat Tradisional terlatih/ memahami cara pembuatan obat tradisional termasuk aspek higiene dan sanitasi	
6.	Personil dalam keadaan bersih	

No	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/Catatan
	ketika memasuki ruang produksi dan selama bekerja di ruang produksi - Cuci tangan sebelum memasuki area produksi dan setelah keluar dari toilet	
7.	Personil menggunakan pakaian kerja/ pelindung yang bersih ketika bekerja di area produksi	
8.	Sampah produksi tidak ditumpuk dalam waktu yang lama dan adanya program/ tindakan yang mencegah munculnya hama/ pest yang dapat mengontaminasi produk	

### Dokumentasi

No	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/Catatan
1.	Tersedia catatan pengolahan dan pengemasan bets, termasuk catatan pengujian - Catatan bets ditandatangani oleh personil yang berwenang sebelum produk didistribusikan, sesuai prosedur pelulusan produk jadi - Protap Pelulusan Produk Jadi mencakup <i>checklist</i> yang perlu dikaji termasuk Catatan Bets (pengolahan, pengemasan dan pengujian) sesuai dengan dokumen izin edar/ registrasi - Direkomendasikan personil yang berwenang tersebut sebagai Penanggung Jawab Teknis	

No	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/Catatan
2.	Catatan jelas terbaca termasuk apabila adanya koreksi (dicoret, diparaf, diberi tanggal dan bila perlu alasan perubahan)	
4.	Memiliki spesifikasi bahan awal, bahan mentah (bila ada), bahan pengemas, produk antara (bila ada), produk ruahan (bila ada), dan produk jadi	
5.	Memiliki prosedur pelulusan produk jadi	
6.	Memiliki prosedur penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian	
7.	Memiliki log book peralatan	
8.	Memiliki kartu persediaan bahan dan produk jadi	
9.	Memiliki prosedur penomoran bets produk jadi	
10.	Setiap bahan, produk, ruangan, peralatan diberi label yang jelas yang mencakup identitas dan/ atau status	

Demikian hasil pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

Pihak Sarana

Pemeriksa,

1. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

1. (Tanda tangan, nama lengkap)

2. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

2. (Tanda tangan, nama lengkap)



Formulir II.6

**REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGKAJIAN IZIN  
FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2021  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

Tanggal Pemeriksaan	Nama Sarana	Jenis Sarana	Alamat Sarana		Nomor Izin Sarana	Tanggal Terbit Izin Sarana	Masa Berlaku Izin Sarana	Nomor Telepon	Nama Penanggung Jawab Sarana (Farmasi)	Nomor SIPA/SIPTTK	Tanggal Terbit SIPA/SIPTTK	Masa Berlaku Izin SIPA/SIPTTK	Alamat Email Sarana	Nama Pemilik/Pimpinan Sarana	Nomor NPWP	Kesimpulan	Tindak Lanjut
			Nama Jalan/Kelurahan	Kecamatan/Pos													

Keterangan:

- Kolom Kesimpulan diisi **“Sesuai”** jika sarana beroperasi sesuai dengan keterangan yang ada di perizinan atau **“Tidak Sesuai”** jika sarana beroperasi tidak sesuai dengan keterangan yang ada di izin.
- Tindak lanjut pemeriksaan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- NPWP diisi dengan NPWP Pemilik Sarana Apotek, atau NPWP Apotek/Perusahaan

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui

ttd

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Formulir II.7

**REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGKAJIAN IZIN  
USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL TAHUN 2021  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

Tanggal Pemeriksaan	Alamat Sarana			Nomor Izin Sarana	Tanggal Terbit Izin Sarana	Masa Berlaku Izin Sarana	Nomor Telepon	Nama Penanggung Jawab Sarana	Nomor Izin Penanggung Jawab (SIPA/SIPTTK)	Tanggal Terbit Izin Penanggung Jawab (SIPA/SIPTTK)	Masa Berlaku Izin Penanggung Jawab (SIPA/SIPTTK)	Alamat Email Sarana	Nama Pemilik/Pimpinan Sarana	Nomor Kesimpulan NPWP	Tindak Lanjut
	Nama Jalan / Kelurahan	Kecamatan	Kode Pos												

Keterangan:

- Kolom Kesimpulan diisi **“Sesuai”** jika sarana beroperasi sesuai dengan keterangan yang ada di perizinan atau **“Tidak Sesuai”** jika sarana beroperasi tidak sesuai dengan keterangan yang ada di izin.
- Tindak lanjut pemeriksaan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui

ttd

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Formulir II.8

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ...

Berdasarkan surat tugas (*Jabatan pemberi tugas*)

No.: ..... tanggal... yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

2 Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

Telah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama sarana :

No. Izin Sarana :

Alamat :

Telp :

Pimpinan/ Penanggung jawab sarana :

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan dan :  
Saran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Pimpinan/Penanggung Jawab Sarana  
atau yang mewakili

Petugas,  
1.

.....

2.

Formulir II.9

**FORMULIR  
PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa :	Kabupaten / Kota : Propinsi : Nomor P-IRT :	
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) :	Penanggungjawab :	
Jenis Pangan IRT :	Tanggal (tgl/bl/th)	
Nama Pengawas Pangan Kab/Kota	Tujuan Pemeriksaan: <input type="checkbox"/> Pemberian SPP-IRT <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Rutin IRTP	

**Cara Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT**

1. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
2. Bubuhkan tanda centang (√) apabila jawaban ya pada kotak dalam kolom yang telah disediakan menurut kategori ketidaksesuaian, yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serius (SE), atau Kritis (KR) yang ditemukan dalam pemeriksaan. Kolom OK apabila kenyataan yang ada di lapangan dilakukan dengan benar berlawanan dengan pernyataan negatif pada kolom 'aspek yang dinilai'.

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN				
		MI	MA	SE	KR	OK
<b>A</b>	<b>LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI</b>					
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, <b>kotor</b> dan berdebu			<input type="checkbox"/>		
<b>B.</b>	<b>BANGUNAN DAN FASILITAS</b>					
2	Ruang produksi <b>sempit</b> , sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan		<input type="checkbox"/>			

3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, <b>kotor</b> , berdebu dan atau berlendir			<input type="checkbox"/>		
4	Ventilasi, pintu, dan jendela <b>tidak terawat</b> , kotor, dan berdebu			<input type="checkbox"/>		
<b>C.</b>	<b>PERALATAN PRODUKSI</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan <b>berkarat dan kotor</b>				<input type="checkbox"/>	
6	Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan <b>kotor</b> , dan <b>tidak menjamin</b> efektifnya sanitasi.			<input type="checkbox"/>		
7	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang berat bersih / isi bersih <b>tidak tersedia</b> atau <b>tidak teliti</b> .			<input type="checkbox"/>		
<b>D.</b>	<b>SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
8	Air bersih <b>tidak tersedia</b> dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi		<input type="checkbox"/>			
9	Air berasal dari suplai yang tidak bersih				<input type="checkbox"/>	
<b>E.</b>	<b>FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
10	Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan <b>tidak tersedia dan tidak terawat</b> dengan baik.		<input type="checkbox"/>			
11	<b>Tidak tersedia</b> sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan.			<input type="checkbox"/>		
12	Sarana toilet/jamban kotor <b>tidak terawat dan terbuka</b> ke ruang produksi.			<input type="checkbox"/>		
13	<b>Tidak tersedia</b> tempat pembuangan sampah tertutup.				<input type="checkbox"/>	
<b>F.</b>	<b>KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
14	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau <b>ada yang sakit</b>				<input type="checkbox"/>	
15	Karyawan di bagian produksi pangan <b>tidak mengenakan</b> pakaian kerja dan / atau <b>mengenakan</b> perhiasan			<input type="checkbox"/>		
16	Karyawan <b>tidak</b> mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban.				<input type="checkbox"/>	

17	Karyawan bekerja <b>dengan perilaku yang tidak baik</b> (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan.		<input type="checkbox"/>			
18	<b>Tidak ada Penanggungjawab</b> higiene karyawan		<input type="checkbox"/>			
<b>G.</b>	<b>PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
19	Bahan kimia pencuci <b>tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur</b> , disimpan di dalam wadah tanpa label		<input type="checkbox"/>			
20	Program higiene dan sanitasi <b>tidak dilakukan</b> secara berkala			<input type="checkbox"/>		
21	Hewan peliharaan <b>terlihat berkeliaran</b> di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan.				<input type="checkbox"/>	
22	Sampah di lingkungan dan di ruang produksi <b>tidak segera dibuang</b> .			<input type="checkbox"/>		
<b>H.</b>	<b>PENYIMPANAN</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
23	Bahan pangan, bahan pengemas <b>disimpan bersama-sama</b> dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding.				<input type="checkbox"/>	
24	Peralatan yang bersih <b>disimpan</b> di tempat yang kotor.				<input type="checkbox"/>	
<b>I.</b>	<b>PENGENDALIAN PROSES</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
25	IRTP tidak memiliki catatan; <b>menggunakan</b> bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang <b>tidak sesuai dengan</b> persyaratan penggunaannya.				<input type="checkbox"/>	
26	IRTP <b>tidak mempunyai</b> atau <b>tidak mengikuti</b> bagan alir produksi pangan.			<input type="checkbox"/>		
27	IRTP <b>tidak menggunakan</b> bahan kemasan khusus untuk pangan.			<input type="checkbox"/>		
28	BTP tidak diberi penandaan dengan benar			<input type="checkbox"/>		
29	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang BTP <b>tidak tersedia</b> atau <b>tidak teliti</b> .			<input type="checkbox"/>		

<b>J.</b>	<b>PELABELAN PANGAN</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
30	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT				<input type="checkbox"/>	
31	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi				<input type="checkbox"/>	
<b>K.</b>	<b>PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
32	IRTP <b>tidak mempunyai</b> penanggung jawab yang memiliki <b>Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)</b>				<input type="checkbox"/>	
33	IRTP <b>tidak</b> melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindakan koreksi			<input type="checkbox"/>		
<b>L.</b>	<b>PENARIKAN PRODUK</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
34	Pemilik IRTP <b>tidak melakukan penarikan produk pangan</b> yang tidak aman				<input type="checkbox"/>	
<b>M.</b>	<b>PENCATATAN DAN DOKUMENTASI</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
35	IRTP <b>tidak memiliki dokumen produksi</b>			<input type="checkbox"/>		
36	Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan <b>tidak</b> disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi.	<input type="checkbox"/>				
<b>N.</b>	<b>PELATIHAN KARYAWAN</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
37	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan					
	Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS					
	Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS					
	Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR					
	Jumlah Ketidaksesuaian MINOR					
	<b>LEVEL IRTP:</b>					

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal

Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

<b>Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal</b>					
<b>Level IRTP</b>	<b>Frekuensi Audit Internal</b>	<b>Minor</b>	<b>Mayor</b>	<b>Serius</b>	<b>Kritis</b>
Level I	Setiap dua bulan	1	1	0	0
Level II	Setiap bulan	1	2-3	0	0
Level III	Setiap dua minggu	NA*	≥4	1-4	0
Level IV	Setiap hari	NA	NA	≥5	≥1

\*NA = Tidak relevan

**Catatan :**

SPP-IRT diberikan apabila IRTP masuk level I – II

- IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level III, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu
- IRTP yang masuk level IV, harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari



Formulir II.10

**FORMULIR  
RINCIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN**

<b>NO</b>	<b>KETIDAK SESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective, eidence, Reference)</b>	<b>KRITERIA KETIDAKSESUAIAN (Minor, Mayor, Serious, Kritis</b>	<b>BATAS WAKTU PENYELESAIAN TINDAKAN PERBAIKAN</b>

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

Formulir II.11

**FORMULIR  
LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN STATUS (CAPA)**

<b>No</b>	<b>KETIDAK SESUAIAN</b>  (PLOR= Problem, Location, Objective, evidence, Reference)	<b>KRITERIA KETIDAKSESUAIAN</b>  (Minor, Mayor, Serius, Kritis)	<b>TINDAKAN PERBAIKAN</b>	<b>STATUS</b> (sesuai/ tidak sesuai)  Diverifikasi oleh Pengawas Pangan Kabupaten/Kota

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

Formulir II.12

**REKAP LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIK KEAMANAN PANGAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta Bimbingan Teknis					No telp/Email
			Nama Peserta	Nama Pemilik/Penangguna jawab sarana	Nama Sarana	Jenis Pangan*	Alamat Sarana	

Keterangan:

\*Jenis Pangan sesuai dengan Peraturan BPOM 22 Tahun 2018

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.13

**REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PIRT PRE-MARKET  
TAHUN 2021**

**BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Periksha	Nama Petugas	Nama Sarana	Jenis Pangan	Nama Penanggung Jawab/ Pemilik Sarana	Alamat Sarana	Nomor Telepon/ email	Nomor NPWP	Hasil Temuan	Kesimpulan Pemeriksaan (Level I/II/III/IV)	No PIRT	Tanggal Terbit	Masa Berlaku

Keterangan: Hasil Temuan dan kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan form pemeriksaan PIRT

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.14

**REKAP HASIL KAJI ULANG DALAM RANGKA PENGAWASAN PRE-MARKET****BULAN PELAKSANAAN: .....**KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Pembahasan Rapat

Keterangan: Hasil Pembahasan berisi info PIRT dan IRTP (telah dicabut, masih berlaku, atau penambahan PIRT dan IRTP baru)

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.15

**INVENTARISASI PIRT DALAM RANGKA PENGAWASAN POST-MARKET  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Pembahasan Rapat

Keterangan: Hasil Pembahasan berisi info PIRT dan IRTP (telah dicabut, masih berlaku, atau penambahan PIRT dan IRTP baru) untuk pemetaan dan sinkronisasi data dengan PTSP  
Upload data PIRT dan IRTP

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PIRT POST-MARKET  
TAHUN 2021  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Periksa	Nama Petugas	Nama Sarana Pangan	Jenis Pangan	Nama Penanggung Jawab/ Pemilik Sarana	Alamat Sarana	Nomor Telepon/ email	Nomor NPWP	Hasil Temuan	Kesimpulan Pemeriksaan (Level I/II/III/IV)	No PIRT	Tanggal Terbit	Masa Berlaku

Keterangan: Hasil Temuan dan kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan form pemeriksaan PIRT

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.17

**REKAP LAPORAN IKLAN PRODUK PANGAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Nama Produk	Nomor izin edar	Nama produsen	Alamat Lokasi Iklan	Jenis iklan	Tanggal Pengawasan Iklan	Nama Petugas Pengawas	Hail Penilaian Iklan (Memenuhi Ketentuan/Tidak Memenuhi Ketentuan)

Keterangan:

\*jenis iklan berupa media cetak/elektronik/media luar ruang  
Media cetak seperti : Koran, brosur, leaflet, poster, stiker, dan spanduk  
Media elektronik : internet, media sosial, TV, serta radio

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



**REKAPITULASI HASIL SAMPLING DAN PENGUJIAN  
TAHUN 2021  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Sampling	Nama Petugas Sampling	Nama Sampel	No PIRT	Jenis Pangan	Sarana Sampling	Alamat Sarana	Parameter Uji	Metode Uji	Kesimpulan label (MK/TMK)*	Kesimpulan sampel (MS/TMS)*

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat hasil pengujian dibandingkan syarat berdasarkan peraturan

TMS : Tidak Memenuhi Syarat hasil pengujian dibandingkan syarat berdasarkan peraturan (disebutkan TMS apa)

MK : Memenuhi Ketentuan yang berlaku

TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan yang berlaku (PP 69 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018)

\*: Pilih salah satu

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,  
ttd

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.19

**MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PENGAWASAN POST-MARKET**

KABUPATEN/KOTA :  
 PROVINSI :

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Pembahasan Rapat

Keterangan: Hasil Pembahasan berisi monitoring dan pengawasan post market yang telah dilakukan terkait target dan hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti

Tempat, Tanggal Pengesahan  
 Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.20

**REKAP LAPORAN KEGIATAN KIE**  
**BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Organisasi/ Perkumpulan*	Narasumber		
				Nama	Jabatan	Instansi

Keterangan:

\*Organisasi/Perkumpulan diisi dengan asal organisasi/perkumpulan yang mengikuti KIE, contoh: anggota saka pramuka, PKK, organisasi perempuan, organisasi profesi, dll

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Petunjuk Operasional ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik khusus menu POM. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah sesuai kewenangannya. Mengingat DAK Nonfisik POM tidak dapat digunakan untuk membiayai seluruh komponen pembiayaan yang dibutuhkan, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. DAK Nonfisik POM bukanlah sumber penganggaran utama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, sehingga kegiatan sejenis dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan atau tanpa adanya alokasi DAK Nonfisik POM.

Dengan telah dicapainya kesepakatan kinerja anggaran DAK Nonfisik POM melalui penerbitan Berita Acara Kesepakatan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan Rencana Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk operasional ini. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan anggaran di luar kegiatan yang disampaikan di petunjuk operasional ini, kecuali karena adanya perubahan kebijakan penganggaran DAK oleh Kementerian Keuangan yang akan diatur oleh lebih lanjut oleh BPOM.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

ANAK LAMPIRAN I.1  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA  
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
 MENU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**TABEL KESEPAKATAN PAGU RKA DAN TARGET OUTPUT RINCIAN KEGIATAN  
 DAK NONFISIK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PER KABUPATEN/KOTA TA 2021**

**Provinsi Aceh**

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Bireuen	46,639,900	140	150,000,000	30	20,448,722	60	57,079,707	120	35,709,000	120	4,953,000	3
Kota Banda Aceh	27,917,500	100	150,000,000	30	23,100,000	59	62,390,000	160	44,635,300	140	3,410,000	1
Kab. Aceh Tengah	41,024,000	100	150,000,000	30	26,065,000	49	43,435,000	78	37,736,600	78	1,128,400	1
Kota Langsa	52,200,000	120	150,000,000	30	34,861,000	60	53,200,000	70	36,225,000	35	7,200,000	2
Kota Lhokseumawe	46,391,400	126	150,000,000	30	0	0	63,891,300	99	29,395,900	99	4,400,000	3
Kab. Aceh Utara	46,640,000	186	150,000,000	30	20,449,000	52	52,220,000	125	43,895,000	125	1,630,000	1
Kab. Aceh Besar	36,860,000	100	150,000,000	30	20,776,560	90	78,300,000	150	28,839,000	146	2,540,000	2
Kab. Pidie	46,640,000	120	150,000,000	30	20,449,000	39	68,920,000	114	27,480,000	35	1,345,000	1
Kab. Aceh Tamiang	37,562,500	90	150,000,000	30	29,526,500	45	47,800,000	70	47,295,000	48	2,650,000	1
Kab. Aceh Tenggara	26,640,000	80	170,000,000	34	20,449,000	50	60,395,000	100	35,550,000	100	1,800,000	2
Kab. Aceh Jaya	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	54,917,600	70	38,727,400	40	4,100,000	1
Kota Sabang	31,900,000	80	150,000,000	30	0	0	33,400,000	70	28,740,000	60	4,200,000	1
Kota Subulussalam	46,640,000	110	150,000,000	30	0	0	54,165,500	80	26,709,500	60	16,800,000	1
Kab. Aceh Singkil	45,530,000	100	150,000,000	30	0	0	58,340,000	84	35,272,000	50	2,610,000	3
Kab. Bener Meriah	37,640,000	80	159,000,000	30	20,449,000	48	46,290,000	70	47,780,000	30	3,675,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Bireuen	4,336,000	2	22,960,000	82	33,300,000	14	4,800,000	2	125,444,175	300	505,670,504
Kota Banda Aceh	2,750,000	1	72,000,000	240	19,200,000	12	5,500,000	2	94,880,000	200	505,782,800
Kab. Aceh Tengah	946,000	1	78,300,000	174	16,200,000	12	1,800,000	2	109,148,000	336	505,783,000
Kota Langsa	4,185,000	1	7,488,000	40	29,500,000	12	7,100,000	2	107,600,000	250	489,559,000
Kota Lhokseumawe	4,200,000	2	23,200,000	116	29,500,000	12	8,400,000	4	125,441,400	400	484,820,000
Kab. Aceh Utara	3,260,000	2	11,200,000	35	31,553,000	15	3,260,000	2	125,452,000	375	489,559,000
Kab. Aceh Besar	1,370,000	1	38,796,000	106	22,447,000	13	2,530,000	2	107,100,000	300	489,558,560
Kab. Pidie	1,345,000	1	35,250,000	75	26,512,000	12	2,390,000	2	125,452,000	300	505,783,000
Kab. Aceh Tamiang	2,650,000	1	18,000,000	24	23,323,000	12	5,300,000	2	125,452,000	250	489,559,000
Kab. Aceh Tenggara	2,550,000	2	6,720,000	21	32,100,000	12	6,031,000	4	125,452,000	400	487,687,000
Kab. Aceh Jaya	3,675,000	1	16,800,000	40	21,448,000	12	7,350,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kota Sabang	1,875,000	2	23,520,000	84	86,190,000	35	3,750,000	2	105,535,000	372	469,110,000
Kota Subulussalam	12,180,000	1	5,600,000	40	27,783,000	24	3,780,000	2	125,452,000	339	469,110,000
Kab. Aceh Singkil	1,940,000	2	0	0	37,000,000	20	2,910,000	3	128,020,000	300	461,622,000
Kab. Bener Meriah	2,675,000	1	11,748,000	60	29,500,000	12	5,350,000	2	125,452,000	250	489,559,000

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Pidie Jaya	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	74	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Aceh Barat	46,420,000	100	150,000,000	30	0	0	58,092,000	70	34,678,000	70	4,975,000	1
Kab. Nagan Raya	41,020,000	100	210,000,000	42	0	0	28,860,000	70	28,933,000	70	3,180,000	4
Kab. Aceh Selatan	34,748,700	80	150,000,000	30	26,095,262	112	51,272,298	100	37,008,674	171	1,700,000	1
Kab. Aceh Barat Daya	35,100,000	80	150,000,000	30	0	0	50,845,000	70	36,760,000	70	9,900,000	2
Kab. Aceh Timur	21,640,000	80	175,000,000	35	20,401,000	61	59,545,000	146	34,860,000	40	3,340,000	2

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Pidie Jaya	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	320	469,110,000
Kab. Aceh Barat	2,487,500	1	30,000,000	75	28,034,500	14	4,975,000	2	125,452,000	300	485,114,000
Kab. Nagan Raya	2,255,000	1	39,100,000	115	20,250,000	12	4,510,000	2	91,002,000	200	469,110,000
Kab. Aceh Selatan	3,400,000	2	17,090,000	89	43,800,000	20	3,400,000	2	120,943,566	300	489,458,500
Kab. Aceh Barat Daya	5,535,000	2	6,300,000	36	29,500,000	36	6,750,000	4	138,420,000	410	469,110,000
Kab. Aceh Timur	3,890,000	1	7,440,000	31	32,162,988	17	5,780,000	2	125,452,000	568	489,510,988

**Provinsi Bali**

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Badung	46,562,128	84	150,000,000	30	20,314,550	42	63,743,980	76	29,302,302	35	4,415,000	1
Kab. Bangli	34,738,500	80	150,000,000	30	0	0	38,898,500	70	31,705,000	91	3,040,000	2
Kab. Buleleng	0	0	0	0	20,449,000	61	0	0	0	0	0	0
Kab. Karang Asem	46,640,000	120	150,000,000	30	20,449,000	40	74,582,400	95	24,520,000	50	3,000,000	3
Kab. Tabanan	46,639,000	90	150,000,000	30	20,444,400	41	67,440,000	80	14,155,600	31	4,900,000	1
Kab. Gianyar	34,175,000	80	150,000,000	30	32,914,000	38	45,870,000	80	28,100,000	45	2,850,000	2
Kab. Klungkung	30,240,000	100	150,000,000	30	20,448,700	52	55,320,000	100	41,445,000	50	960,000	2
Kota Denpasar	23,095,930	80	150,000,000	30	1,177,500	36	28,702,877	70	1,425,000	30	300,000	2

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Badung	3,166,000	1	9,870,000	28	29,500,000	12	6,332,000	2	125,078,560	246	488,284,520
Kab. Bangli	3,040,000	2	24,000,000	80	112,810,000	46	3,040,000	2	67,838,000	210	469,110,000
Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,449,000
Kab. Karang Asem	3,432,000	3	7,486,800	30	29,500,000	12	4,576,000	4	125,372,800	400	489,559,000
Kab. Tabanan	3,920,000	1	20,240,000	38	28,580,000	12	7,840,000	2	125,400,000	291	489,559,000
Kab. Gianyar	1,800,000	2	17,600,000	32	48,900,000	30	1,900,000	2	125,450,000	400	489,559,000
Kab. Klungkung	2,880,000	6	32,437,900	30	28,500,000	15	1,920,000	4	125,407,400	400	489,559,000
Kota Denpasar	300,000	2	1,575,000	75	33,840,000	12	300,000	2	35,275,000	200	275,991,307



**Provinsi Banten**

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Tangerang	36,576,600	80	150,000,000	30	20,290,000	78	64,792,000	120	28,000,000	60	4,920,000	2
Kota Serang	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	80	86,255,000	80	10,490,000	80	1,000,000	1
Kota Tangerang Selatan	46,640,000	135	0	0	0	0	67,740,000	120	14,400,000	96	2,555,000	1
Kab. Lebak	36,640,000	80	160,000,000	30	20,449,000	36	69,240,000	120	26,045,000	44	2,460,000	1
Kab. Pandeglang	46,640,000	100	150,000,000	30	20,449,000	41	77,773,000	76	15,600,000	30	4,372,000	2

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Tangerang	3,358,000	2	23,500,000	100	60,481,200	28	8,558,000	2	134,807,200	200	535,283,000
Kota Serang	1,750,000	1	15,047,000	75	45,200,000	25	3,500,000	2	125,452,000	200	505,783,000
Kota Tangerang Selatan	1,095,000	1	23,488,000	144	26,860,000	80	2,190,000	2	275,452,000	220	460,420,000
Kab. Lebak	2,095,000	1	8,200,000	24	34,788,000	14	4,190,000	2	125,452,000	300	489,559,000
Kab. Pandeglang	4,350,000	2	22,535,000	98	30,432,000	18	8,180,000	2	125,452,000	208	505,783,000

## Provinsi Bengkulu

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Seluma	40,560,000	80	150,000,000	30	0	0	63,749,540	70	22,478,000	45	4,860,000	2
Kab. Bengkulu Tengah	46,640,000	126	150,000,000	30	0	0	68,920,000	80	24,405,000	45	4,420,000	2
Kab. Kepahiang	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	47,261,775	80	42,000,000	60	8,480,000	4
Kab. Lebong	47,248,700	80	150,000,000	30	0	0	60,140,000	70	10,290,000	30	4,515,000	1
Kab. Rejang Lebong	46,640,000	100	150,000,000	30	0	0	57,957,500	100	34,125,000	90	5,662,500	1
Kab. Bengkulu Utara	41,838,000	80	150,000,000	30	0	0	82,924,000	70	21,254,000	32	3,424,000	1
Kab. Mukomuko	45,400,000	80	150,000,000	30	28,793,500	36	81,800,000	70	14,395,000	30	2,600,000	1
Kab. Kaur	46,570,000	110	150,000,000	30	0	0	55,030,000	70	34,292,000	38	4,150,000	2
Kota Bengkulu	51,100,000	80	150,000,000	30	28,900,000	100	54,900,000	100	24,800,000	80	4,000,000	1
Kab. Bengkulu Selatan	27,285,000	80	150,000,000	30	0	0	38,850,000	70	13,100,000	49	2,550,000	2

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Seluma	3,806,000	1	11,700,000	26	61,900,000	26	7,612,000	2	102,444,460	200	469,110,000
Kab. Bengkulu Tengah	4,095,000	2	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	4	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Kepahiang	1,475,000	1	16,410,000	50	27,800,000	12	3,570,000	2	125,450,000	432	469,086,775
Kab. Lebong	4,515,000	1	5,940,000	48	27,420,000	24	9,030,000	2	145,019,300	280	464,118,000
Kab. Rejang Lebong	5,043,750	1	37,500,000	150	30,930,000	27	7,587,500	2	125,452,000	368	500,898,250
Kab. Bengkulu Utara	3,218,000	1	10,400,000	40	50,040,000	24	6,436,000	2	99,576,000	200	469,110,000
Kab. Mukomuko	2,387,500	1	9,740,000	28	34,716,000	12	4,775,000	2	114,952,000	200	489,559,000
Kab. Kaur	4,150,000	2	9,000,000	36	29,965,000	12	8,300,000	4	127,653,000	465	469,110,000
Kota Bengkulu	4,095,000	1	23,712,000	100	30,900,000	12	7,875,000	2	125,501,000	200	505,783,000
Kab. Bengkulu Selatan	2,550,000	2	30,000,000	115	33,000,000	12	2,550,000	2	185,447,000	550	485,332,000

**Provinsi D.I Yogyakarta**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PAGU RKA 1A</b>	<b>TARGET OUTPUT 1A</b>	<b>PAGU RKA 1B</b>	<b>TARGET OUTPUT 1B</b>	<b>PAGU RKA 2A</b>	<b>TARGET OUTPUT 2A</b>	<b>PAGU RKA 3A</b>	<b>TARGET OUTPUT 3A</b>	<b>PAGU RKA 3B</b>	<b>TARGET OUTPUT 3B</b>	<b>PAGU RKA 3C</b>	<b>TARGET OUTPUT 3C</b>
Kab. Gunung Kidul	36,280,000	80	150,000,000	30	15,145,000	84	72,351,000	160	22,035,000	180	2,100,000	3
Kab. Bantul	46,640,000	160	150,000,000	30	20,449,000	62	68,495,000	160	27,550,000	140	1,700,000	4
Kab. Sleman	45,615,800	200	150,800,000	30	0	0	127,339,600	400	15,290,000	200	1,350,000	1
Kota Yogyakarta	46,640,000	240	150,000,000	30	20,449,000	36	78,145,000	500	12,760,000	35	6,840,000	1
Kab. Kulon Progo	22,550,000	100	150,000,000	30	31,200,000	60	47,375,000	250	33,675,000	250	2,125,000	1

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PAGU RKA 4A</b>	<b>TARGET OUTPUT 4A</b>	<b>PAGU RKA 4B</b>	<b>TARGET OUTPUT 4B</b>	<b>PAGU RKA 4C</b>	<b>TARGET OUTPUT 4C</b>	<b>PAGU RKA 4D</b>	<b>TARGET OUTPUT 4D</b>	<b>PAGU RKA 5A</b>	<b>TARGET OUTPUT 5A</b>	<b>Total Pagu RKA</b>
Kab. Gunung Kidul	1,575,000	3	17,400,000	180	100,520,000	50	1,575,000	3	102,402,000	240	521,383,000
Kab. Bantul	1,275,000	2	24,797,000	150	83,250,000	50	1,275,000	2	125,452,000	600	550,883,000
Kab. Sleman	3,150,000	1	12,935,000	170	67,600,000	60	1,800,000	4	147,157,468	200	573,037,868
Kota Yogyakarta	3,840,000	2	21,010,000	144	48,567,000	45	7,680,000	2	125,452,000	525	521,383,000
Kab. Kulon Progo	1,275,000	1	34,146,000	168	81,627,900	34	5,100,000	2	125,413,100	350	534,487,000

**Provinsi Gorontalo**

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Pohuwato	45,756,400	80	150,000,000	30	0	0	64,378,000	70	22,360,600	30	3,615,000	1
Kab. Gorontalo Utara	46,579,000	80	150,000,000	30	0	0	69,839,000	70	17,381,000	30	10,640,000	2
Kab. Boalemo	36,032,000	80	150,000,000	30	0	0	81,630,000	105	13,754,000	30	1,360,000	1
Kota Gorontalo	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	45	66,760,000	140	24,701,000	49	6,530,000	1
Kab. Gorontalo	46,552,000	94	150,000,000	30	20,537,000	74	72,740,000	160	23,595,000	100	2,110,000	1
Kab. Bone Bolango	47,288,000	80	150,000,000	30	0	0	75,536,000	70	18,450,000	30	660,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Pohuwato	4,215,000	1	14,400,000	24	29,200,000	12	8,430,000	1	126,755,000	200	469,110,000
Kab. Gorontalo Utara	4,220,000	1	7,030,000	25	28,850,000	12	7,883,000	2	125,440,000	250	467,862,000
Kab. Boalemo	2,170,000	1	9,360,000	24	31,140,000	12	5,700,000	2	137,964,000	366	469,110,000
Kota Gorontalo	5,370,000	1	33,300,000	148	31,441,000	14	10,740,000	2	125,452,000	270	521,383,000
Kab. Gorontalo	3,740,000	2	7,200,000	36	28,900,000	12	8,640,000	4	125,545,000	260	489,559,000
Kab. Bone Bolango	550,000	1	55,350,000	24	19,800,000	12	1,100,000	2	100,376,000	200	469,110,000

**Provinsi Jambi**

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Batang Hari	36,544,000	80	150,000,000	25	0	0	61,744,000	80	45,921,500	98	1,000,000	1
Kab. Sarolangun	46,327,900	100	150,000,000	30	24,870,360	50	53,541,840	80	38,212,000	50	4,292,000	1
Kota Jambi	45,152,500	144	150,000,000	30	21,936,500	41	68,920,000	146	24,405,000	39	4,420,000	3
Kab. Muaro Jambi	40,400,000	80	150,000,000	30	20,449,000	39	36,245,000	75	57,400,000	126	4,100,000	4
Kab. Tanjung Jabung Barat	31,500,000	80	150,000,000	30	0	0	49,000,000	80	31,800,000	60	2,175,000	1
Kota Sungai Penuh	35,634,000	100	150,000,000	30	0	0	63,707,000	100	17,480,000	30	1,830,000	1
Kab. Merangin	50,645,000	82	150,000,000	30	16,090,300	39	90,488,000	82	16,360,700	30	2,250,000	1
Kab. Bungo	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	60	67,060,000	80	27,923,000	100	2,762,000	2
Kab. Tebo	47,890,000	136	148,750,000	35	20,449,000	48	49,631,720	84	46,113,280	84	2,000,000	1
Kab. Tanjung Jabung Timur	45,000,000	80	150,000,000	30	0	0	74,600,000	70	20,020,000	35	4,782,000	2
Kab. Kerinci	47,275,000	80	150,000,000	30	0	0	62,600,000	80	18,865,000	40	6,525,000	3

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Batang Hari	2,817,500	1	22,500,000	50	54,140,000	28	3,120,000	4	91,323,000	200	469,110,000
Kab. Sarolangun	4,094,000	1	29,400,000	42	28,404,000	18	8,188,000	2	102,228,900	200	489,559,000
Kota Jambi	4,095,000	3	52,416,000	173	29,500,000	26	8,190,000	4	125,452,000	400	534,487,000
Kab. Muaro Jambi	2,050,000	2	45,447,000	140	29,500,000	25	4,100,000	4	131,692,000	220	521,383,000
Kab. Tanjung Jabung Barat	2,175,000	1	42,120,000	90	89,900,000	40	4,050,000	2	82,614,000	260	485,334,000
Kota Sungai Penuh	3,130,000	1	27,000,000	75	63,672,000	30	8,510,000	2	114,342,000	300	485,305,000
Kab. Merangin	2,012,500	1	11,255,500	52	36,050,000	12	4,025,000	2	110,382,000	280	489,559,000
Kab. Bungo	2,571,500	1	18,240,000	76	39,542,400	15	5,143,000	2	125,452,000	205	505,782,900
Kab. Tebo	2,189,960	1	17,003,040	38	26,180,000	14	3,900,000	2	125,452,000	320	489,559,000
Kab. Tanjung Jabung Timur	4,000,000	2	7,488,000	36	29,600,000	48	8,180,000	2	125,440,000	200	469,110,000
Kab. Kerinci	8,700,000	4	18,000,000	40	59,830,000	43	8,700,000	4	88,615,000	200	469,110,000

## Provinsi Jawa Barat

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kota Banjar	46,640,000	90	150,000,000	30	0	0	68,910,000	70	24,408,300	30	4,425,000	1
Kota Bogor	46,640,000	90	150,000,000	30	20,449,000	50	68,920,000	75	24,405,000	75	4,420,000	1
Kab. Purwakarta	48,627,271	180	150,000,000	30	20,449,000	75	76,355,678	140	18,032,500	35	792,000	1
Kab. Ciannis	46,640,000	124	150,000,000	30	20,449,000	68	57,105,000	100	34,015,000	70	6,625,000	2
Kab. Pangandaran	47,750,000	110	150,000,000	30	22,949,000	55	102,400,000	140	17,720,000	140	920,000	1
Kab. Indramayu	46,640,000	87	150,000,000	20	20,449,000	40	52,097,500	70	41,472,000	70	5,625,000	2
Kab. Bandung Barat	46,640,000	120	150,000,000	30	20,449,000	70	67,820,000	120	28,050,000	120	1,875,000	1
Kota Bandung	46,640,000	210	150,000,000	30	20,449,000	120	68,920,000	212	24,405,000	150	4,420,000	3
Kab. Subang	46,640,000	90	150,000,000	30	20,449,000	68	67,000,000	90	29,745,000	90	1,000,000	1
Kab. Bandung	46,620,000	80	150,000,000	30	19,757,000	100	68,960,000	100	24,405,000	100	4,700,000	1
Kab. Sumedang	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	160	24,405,000	30	4,090,000	1
Kab. Majalengka	0	0	0	0	20,449,000	72	0	0	0	0	0	0
Kab. Tasikmalaya	56,370,000	100	150,000,000	30	21,655,000	36	65,152,000	70	19,820,000	70	4,600,000	1
Kab. Bekasi	35,318,836	100	150,000,000	30	22,469,510	36	82,475,972	70	23,170,000	33	1,400,000	1
Kota Sukabumi	55,600,000	100	150,000,000	30	18,700,000	75	92,100,000	100	22,515,000	100	2,050,000	1
Kab. Garut	84,760,000	190	150,000,000	30	59,810,000	91	30,040,000	180	56,600,000	100	2,600,000	1



KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kota Banjar	9,700,000	4	36,750,000	150	24,821,600	20	9,700,000	4	125,578,500	250	500,933,400
Kota Bogor	4,095,000	1	39,100,000	127	29,712,000	50	8,190,000	2	125,452,000	210	521,383,000
Kab. Purwakarta	462,000	1	18,840,000	84	44,640,000	30	1,584,000	2	125,980,719	380	505,763,168
Kab. Ciamis	5,100,000	2	32,160,000	222	79,921,000	74	6,520,000	2	125,452,000	440	563,987,000
Kab. Pangandaran	920,000	1	8,740,000	75	51,884,000	60	6,700,000	2	95,800,000	200	505,783,000
Kab. Indramayu	3,750,000	2	35,760,000	126	28,620,000	12	3,750,000	2	133,219,500	350	521,383,000
Kab. Bandung Barat	2,475,000	1	30,672,000	130	72,500,000	30	4,950,000	2	125,452,000	300	550,883,000
Kota Bandung	4,095,000	2	39,312,000	245	118,000,000	118	8,190,000	4	125,452,000	400	609,883,000
Kab. Subang	1,700,000	1	31,550,000	130	71,047,000	40	6,300,000	2	125,452,000	300	550,883,000
Kab. Bandung	4,700,000	1	52,325,000	175	147,470,000	70	8,450,000	2	125,100,000	240	652,487,000
Kab. Sumedang	4,350,000	1	39,150,000	428	36,000,000	12	5,950,000	2	121,429,000	200	500,934,000
Kab. Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,449,000
Kab. Tasikmalaya	2,300,000	1	32,370,000	75	23,690,000	14	8,550,000	2	121,276,000	200	505,783,000
Kab. Bekasi	1,050,000	1	46,846,721	75	45,000,000	24	2,100,000	2	125,451,961	250	535,283,000
Kota Sukabumi	850,000	1	14,625,000	75	21,772,500	70	1,700,000	2	125,850,000	300	505,762,500
Kab. Garut	900,000	1	47,780,400	130	44,460,000	60	3,550,000	2	70,380,000	200	550,880,400

## Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Karanganyar	47,545,100	82	150,000,000	30	14,676,300	42	87,948,200	78	21,735,400	78	2,983,000	1
Kab. Jepara	46,640,000	200	150,000,000	40	20,449,000	53	30,925,000	90	25,368,000	90	1,060,000	1
Kota Salatiga	40,956,000	140	95,000,000	19	0	0	61,778,000	120	10,190,000	75	490,000	1
Kab. Boyolali	46,640,000	120	150,000,000	30	20,449,000	100	68,700,000	150	27,845,000	100	1,200,000	2
Kab. Semarang	46,640,000	112	150,000,000	30	20,457,000	70	80,395,500	175	13,761,000	60	3,975,000	1
Kab. Pati	46,640,000	120	150,000,000	30	20,449,000	162	56,275,000	350	37,050,000	332	4,420,000	4
Kab. Purworejo	48,491,000	150	148,148,000	37	20,449,000	36	75,900,000	120	15,756,800	40	6,087,600	1
Kota Semarang	46,592,784	84	150,000,000	30	20,524,000	44	65,640,360	90	30,674,912	90	1,485,000	3
Kab. Kudus	46,638,000	80	150,000,000	30	20,449,000	100	68,536,000	80	23,640,000	30	3,990,000	1
Kota Tegal	46,629,000	120	150,000,000	30	20,449,000	60	68,768,000	156	23,100,000	70	5,093,000	1
Kab. Pekalongan	75,894,600	300	150,000,000	30	34,915,800	76	64,863,500	175	59,565,000	145	1,080,000	1
Kab. Pemalang	83,420,000	240	150,000,000	30	23,479,000	80	86,150,000	175	24,508,000	85	4,317,000	3
Kab. Grobogan	58,790,000	120	150,000,000	30	78,855,000	150	54,736,000	80	16,600,000	30	3,540,000	1
Kab. Purbalingga	46,640,000	136	150,000,000	30	20,449,000	66	78,981,500	128	17,728,400	59	1,035,000	1
Kab. Cilacap	47,000,000	185	150,000,000	30	0	0	47,925,000	105	48,361,950	65	1,000,000	1
Kab. Banyumas	46,640,000	200	150,000,000	30	20,449,000	57	68,425,000	280	24,700,000	88	4,620,000	1
Kab. Klaten	46,640,000	100	150,000,000	30	20,449,000	50	75,735,000	120	17,990,000	50	4,020,000	2
Kab. Wonogiri	50,110,000	90	150,000,000	30	19,187,000	50	67,200,000	70	25,831,000	80	3,135,000	1
Kab. Batang	46,640,000	115	150,000,000	30	20,449,000	73	64,290,000	114	29,785,000	114	3,670,000	2
Kab. Sukoharjo	43,860,000	123	150,000,000	30	19,763,000	100	48,480,000	80	12,200,000	80	3,780,000	2
Kab. Blora	48,020,000	120	150,000,000	30	25,080,000	60	59,460,000	120	19,874,000	70	2,060,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Karanganyar	6,235,000	1	42,840,000	126	25,620,000	25	12,470,000	2	109,330,000	200	521,383,000
Kab. Jepara	1,060,000	1	31,500,000	140	70,160,000	28	2,120,000	2	142,101,000	630	521,383,000
Kota Salatiga	490,000	1	2,590,000	75	103,100,000	20	980,000	2	169,760,000	500	485,334,000
Kab. Boyolali	450,000	2	12,350,000	76	52,247,000	20	450,000	2	125,452,000	300	505,783,000
Kab. Semarang	3,975,000	1	20,250,000	126	29,900,000	22	3,975,000	2	148,054,500	200	521,383,000
Kab. Pati	547,500	1	13,609,500	126	54,800,000	34	12,140,000	2	125,452,000	500	521,383,000
Kab. Purworejo	1,704,000	1	20,351,000	75	29,240,000	12	14,166,000	2	125,452,000	480	505,745,400
Kota Semarang	1,720,000	1	58,425,000	205	89,475,000	75	3,530,000	2	125,419,944	256	593,487,000
Kab. Kudus	3,806,000	1	30,240,000	126	39,340,000	24	7,612,000	2	125,438,000	300	519,689,000
Kota Tegal	4,065,000	1	22,824,000	126	44,640,000	65	9,665,000	2	126,150,000	320	521,383,000
Kab. Pekalongan	940,000	2	26,260,000	101	35,960,000	24	940,000	2	55,364,100	300	505,783,000
Kab. Pemalang	3,790,000	2	26,775,000	119	30,772,000	12	3,790,000	2	68,782,000	200	505,783,000
Kab. Grobogan	3,540,000	1	13,650,000	75	30,230,000	12	3,540,000	2	92,302,000	200	505,783,000
Kab. Purbalingga	775,000	1	28,350,000	126	50,352,000	35	1,620,000	2	125,452,000	390	521,382,900
Kab. Cilacap	4,500,000	2	42,695,050	126	30,150,000	12	3,750,000	3	125,552,000	408	500,934,000
Kab. Banyumas	6,245,000	2	50,266,000	168	59,000,000	620	8,190,000	2	125,452,000	630	563,987,000
Kab. Klaten	3,490,000	2	22,337,000	100	36,180,000	18	3,490,000	2	125,452,000	400	505,783,000
Kab. Wonogiri	4,180,000	1	22,175,000	80	33,930,000	18	3,135,000	2	126,900,000	200	505,783,000
Kab. Batang	3,300,000	2	18,600,000	84	40,297,000	16	3,300,000	2	125,452,000	375	505,783,000
Kab. Sukoharjo	3,730,000	2	12,355,000	150	89,970,000	42	5,415,000	3	131,830,000	450	521,383,000
Kab. Blora	1,795,000	1	15,000,000	75	88,500,000	36	3,590,000	2	92,404,000	300	505,783,000

KABUPATEN/KOT A	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT T 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT T 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT T 3C
Kab. Kendal	46,640,000	110	150,000,000	30	20,449,000	100	50,610,000	100	30,350,000	80	950,000	1
Kab. Rembang	46,640,000	130	150,000,000	30	20,449,000	40	68,920,000	268	24,405,000	45	4,420,000	2
Kab. Wonosobo	47,840,000	67	150,000,000	30	9,525,000	40	85,850,000	175	16,321,000	175	2,650,000	2
Kab. Brebes	44,541,000	80	150,000,000	30	20,313,960	36	66,786,000	300	19,545,000	33	2,060,000	2
Kab. Banjarnegara	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	49,250,000	100	30,345,000	75	18,150,000	1
Kab. Temanggung	46,640,000	85	150,000,000	30	20,449,000	57	69,011,000	120	24,405,000	120	4,329,000	3
Kab. Magelang	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	42	77,045,000	120	16,485,000	60	4,215,000	2
Kab. Tegal	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	98	52,425,000	150	41,682,500	91	3,637,500	3
Kota Magelang	46,640,000	90	150,000,000	30	7,600,000	40	69,100,000	80	5,685,000	80	1,890,000	1
Kab. Demak	46,640,000	180	150,000,000	30	20,449,000	36	74,000,000	150	20,125,000	35	3,620,000	2
Kota Pekalongan	39,310,000	80	150,000,000	30	24,760,000	80	53,140,000	160	28,611,000	160	1,230,000	2
Kab. Kebumen	47,031,000	150	150,000,000	30	19,970,000	100	109,987,000	315	17,565,000	175	3,600,000	2
Kota Surakarta	46,132,000	190	150,000,000	30	20,412,000	149	54,540,000	180	11,685,000	100	1,056,000	1

KABUPATEN/KOT A	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGE T OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGE T OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Kendal	712,500	1	26,111,500	126	90,400,000	40	2,850,000	2	102,310,000	200	521,383,000
Kab. Rembang	4,095,000	4	39,312,000	174	29,500,000	25	8,190,000	2	125,452,000	420	521,383,000
Kab. Wonosobo	2,610,000	1	18,144,000	168	87,900,000	36	2,320,000	2	111,327,000	235	534,487,000
Kab. Brebes	1,030,000	1	24,765,000	75	22,880,000	12	2,060,000	2	151,800,000	300	505,780,960
Kab. Banjarnegara	2,862,500	1	32,000,000	160	43,272,000	25	2,962,500	3	125,452,000	660	521,383,000
Kab. Temanggung	5,595,000	3	52,335,000	270	30,676,000	25	5,595,000	3	125,452,000	306	534,487,000
Kab. Magelang	14,752,500	7	37,260,000	207	59,043,500	25	12,645,000	6	125,452,000	250	563,987,000
Kab. Tegal	2,520,000	2	47,680,000	160	55,357,000	30	5,040,000	4	125,452,000	300	550,883,000
Kota Magelang	945,000	1	9,519,000	76	61,380,000	31	1,890,000	2	151,134,000	200	505,783,000
Kab. Demak	1,545,000	1	33,750,000	75	27,112,000	12	3,090,000	2	125,452,000	360	505,783,000
Kota Pekalongan	1,230,000	2	15,000,000	100	75,064,000	28	1,845,000	3	115,593,000	500	505,783,000
Kab. Kebumen	1,905,000	1	27,300,000	168	89,220,000	36	4,050,000	2	50,755,000	210	521,383,000
Kota Surakarta	2,575,000	1	9,000,000	90	126,494,000	399	3,914,000	2	79,975,000	323	505,783,000

## Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Magetan	46,639,800	200	150,000,000	30	0	0	63,909,650	175	32,369,250	70	1,466,000	1
Kab. Probolinggo	46,640,000	120	150,000,000	30	0	0	41,940,000	160	53,685,000	160	2,120,000	1
Kab. Tuban	30,890,000	80	150,000,000	30	21,545,000	40	51,650,000	90	30,567,000	45	2,200,000	1
Kab. Trenggalek	46,640,000	102	150,000,000	30	20,449,000	64	78,226,100	224	17,366,400	100	2,152,500	1
Kota Probolinggo	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	76,215,000	192	12,350,000	65	6,240,000	6
Kab. Bojonegoro	46,640,000	150	150,000,000	30	20,449,000	30	73,440,120	175	22,804,880	55	1,500,000	2
Kab. Sumenep	46,600,000	133	150,000,000	30	20,449,000	42	62,480,000	70	17,464,000	30	800,000	1
Kab. Bangkalan	49,440,000	190	147,200,000	32	20,449,000	65	68,920,000	140	24,475,000	50	4,350,000	1
Kota Pasuruan	71,750,000	80	125,000,000	25	0	0	79,800,000	90	19,740,000	50	1,800,000	2
Kab. Kediri	46,640,000	130	150,000,000	30	20,449,000	126	60,813,000	270	36,112,000	270	820,000	1
Kab. Lamongan	122,211,000	200	150,000,000	30	84,080,000	85	43,891,000	70	19,200,000	30	4,038,000	2
Kab. Pacitan	48,475,350	135	150,000,000	30	20,770,000	36	117,175,200	280	28,375,000	100	1,900,000	2
Kab. Ponorogo	46,206,000	150	150,000,000	30	20,320,000	40	56,784,000	150	9,000,000	45	3,000,000	1
Kota Mojokerto	23,124,050	80	90,000,000	18	10,360,590	36	49,900,800	105	19,628,775	100	3,421,800	2
Kab. Nganjuk	53,150,000	200	150,000,000	30	18,400,000	100	77,625,000	250	82,325,000	250	950,000	1
Kab. Madiun	47,716,000	171	148,500,000	33	20,410,000	77	69,424,200	200	26,102,400	200	2,218,400	1
Kota Batu	17,850,000	80	100,000,000	20	0	0	68,428,000	120	5,667,000	45	1,350,000	1
Kab. Sampang	46,510,000	80	150,000,000	30	0	0	97,696,000	160	24,404,975	78	1,425,000	2
Kab. Pasuruan	27,700,000	80	150,000,000	30	14,980,000	48	100,000,000	200	44,300,000	170	2,100,000	1
Kab. Mojokerto	0	0	0	0	20,449,000	36	0	0	0	0	0	0
Kab. Tulungagung	46,640,000	128	150,000,000	30	20,449,000	135	56,652,500	85	38,242,500	85	2,850,000	4

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Magetan	549,750	1	27,000,000	75	52,445,000	28	1,099,500	2	125,452,000	500	500,930,950
Kab. Probolinggo	1,025,000	1	58,887,000	126	20,160,000	12	1,025,000	2	125,452,000	200	500,934,000
Kab. Tuban	4,800,000	1	25,520,000	80	82,411,000	41	4,400,000	2	101,800,000	200	505,783,000
Kab. Trenggalek	3,675,000	2	59,444,400	318	59,000,000	25	1,581,600	2	125,452,000	462	563,987,000
Kota Probolinggo	3,600,000	3	13,000,000	130	61,150,000	25	6,287,000	4	125,452,000	200	500,934,000
Kab. Bojonegoro	2,250,000	3	51,047,000	126	55,550,000	32	1,750,000	2	125,452,000	300	550,883,000
Kab. Sumenep	800,000	1	40,320,000	168	91,130,000	26	1,600,000	2	89,700,000	200	521,343,000
Kab. Bangkalan	3,550,000	1	8,246,800	40	30,180,000	24	7,285,400	2	125,462,800	390	489,559,000
Kota Pasuruan	1,800,000	2	10,800,000	120	50,440,000	20	1,800,000	2	122,350,000	300	485,280,000
Kab. Kediri	541,000	1	31,500,000	225	149,580,000	60	1,080,000	2	125,452,000	345	622,987,000
Kab. Lamongan	4,038,000	2	40,320,000	168	39,000,000	24	4,711,000	2	52,498,000	200	563,987,000
Kab. Pacitan	1,675,000	1	49,185,000	134	24,850,000	12	3,350,000	2	75,627,450	250	521,383,000
Kab. Ponorogo	1,200,000	1	30,000,000	150	106,800,000	42	2,596,800	2	124,902,000	450	550,808,800
Kota Mojokerto	3,613,980	2	24,707,340	168	86,354,400	36	3,421,800	2	109,663,500	300	424,197,035
Kab. Nganjuk	950,000	1	41,265,000	126	75,368,000	24	1,900,000	2	48,950,000	200	550,883,000
Kab. Madiun	4,527,600	1	11,500,000	155	81,779,000	62	3,877,600	2	105,327,800	360	521,383,000
Kota Batu	2,700,000	1	16,000,000	150	56,800,000	100	15,000,000	2	216,268,000	300	500,063,000
Kab. Sampang	1,425,000	2	25,700,000	79	33,540,000	20	1,425,000	2	103,031,250	250	485,157,225
Kab. Pasuruan	3,000,000	1	19,530,000	126	52,473,000	15	4,200,000	2	103,100,000	200	521,383,000
Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,449,000
Kab. Tulungagung	5,100,000	4	52,320,000	327	51,752,000	28	1,425,000	2	125,452,000	414	550,883,000

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Sidoarjo	46,640,000	203	150,000,000	30	20,439,300	222	67,350,000	150	29,568,675	298	825,000	1
Kab. Lumajang	46,639,950	94	150,000,000	30	20,449,000	170	76,066,400	154	16,445,500	154	1,350,000	1
Kab. Gresik	83,575,000	252	150,000,000	30	18,750,000	72	60,514,800	120	23,836,200	45	1,060,000	1
Kota Kediri	58,965,000	150	150,000,000	30	23,414,000	60	27,932,000	100	35,187,000	100	2,010,000	2
Kab. Jember	46,640,000	195	150,000,000	30	20,449,000	44	58,500,000	120	36,624,000	120	2,812,500	1
Kab. Pamekasan	25,581,600	80	150,000,000	30	0	0	54,714,000	140	30,870,000	150	4,500,000	3
Kota Blitar	46,639,900	190	150,000,000	30	20,448,900	60	68,920,000	164	24,405,000	37	4,390,000	2
Kota Malang	58,800,000	100	196,000,000	40	14,990,000	42	80,100,000	150	19,071,000	150	2,340,000	1
Kab. Malang	112,944,000	200	150,000,000	30	33,955,000	65	79,774,000	70	13,737,500	70	1,255,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Sidoarjo	915,000	1	14,250,000	168	107,250,000	33	1,275,000	2	125,320,000	400	563,832,975
Kab. Lumajang	1,350,000	1	12,600,000	140	57,900,000	35	9,404,750	2	129,177,200	360	521,382,800
Kab. Gresik	795,000	1	27,920,000	132	57,390,000	25	1,590,000	2	125,452,000	200	550,883,000
Kota Kediri	2,010,000	2	30,000,000	150	44,420,000	18	2,010,000	2	145,435,000	400	521,383,000
Kab. Jember	3,845,000	1	39,200,000	140	59,000,000	24	8,450,000	2	125,362,500	270	550,883,000
Kab. Pamekasan	6,000,000	2	21,360,000	110	66,400,000	50	6,000,000	4	119,908,400	250	485,334,000
Kota Blitar	4,090,000	2	39,312,000	130	29,500,000	12	8,180,000	4	125,452,000	280	521,337,800
Kota Malang	3,680,000	2	16,800,000	168	85,296,000	45	3,010,000	2	113,400,000	200	593,487,000
Kab. Malang	1,380,000	1	37,500,000	168	56,347,500	55	4,010,000	2	132,084,000	200	622,987,000



**Provinsi Kalimantan Barat**

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kota Pontianak	39,745,040	80	150,000,000	30	20,477,267	60	72,491,250	150	21,049,243	65	500,000	1
Kab. Bengkayang	46,640,000	84	150,000,000	30	0	0	66,680,000	70	26,845,000	30	4,220,000	1
Kab. Sanggau	38,890,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	74,575,200	70	20,494,800	34	2,675,000	1
Kab. Sambas	52,144,704	150	150,000,000	30	25,326,068	64	53,884,644	120	35,837,832	39	2,400,000	4
Kab. Sekadau	41,090,000	80	150,000,000	30	0	0	37,316,000	70	58,932,500	30	1,770,000	1
Kab. Ketapang	46,640,000	150	150,000,000	30	20,449,000	54	67,285,000	120	29,260,000	68	1,200,000	1
Kab. Mempawah	48,939,800	110	150,000,000	30	0	0	68,413,000	105	18,840,200	30	4,360,000	1
Kab. Sintang	45,406,000	80	150,000,000	30	23,629,000	62	61,920,000	70	24,382,000	30	4,420,000	1
Kab. Landak	35,800,000	80	150,000,000	30	0	0	61,032,000	70	23,745,000	30	3,150,000	1
Kota Singkawang	0	0	0	0	20,400,000	67	0	0	0	0	0	0

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kota Pontianak	1,000,000	2	22,500,000	75	81,300,000	27	1,000,000	2	95,720,200	200	505,783,000
Kab. Bengkayang	3,945,000	1	8,708,000	24	28,730,000	12	7,890,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Sanggau	3,350,000	1	18,750,000	34	35,040,000	20	3,350,000	2	121,985,000	250	489,559,000
Kab. Sambas	2,400,000	4	28,194,300	90	45,980,000	30	2,400,000	4	90,991,452	200	489,559,000
Kab. Sekadau	1,577,500	1	36,000,000	20	34,200,000	12	2,155,000	2	99,205,000	201	462,246,000
Kab. Ketapang	1,900,000	1	23,730,000	86	36,067,000	14	3,800,000	1	125,452,000	240	505,783,000
Kab. Mempawah	4,320,000	1	16,935,000	50	24,720,000	20	7,130,000	2	125,452,000	244	469,110,000
Kab. Sintang	6,900,000	1	7,488,000	24	33,062,000	12	13,800,000	2	118,552,000	200	489,559,000
Kab. Landak	6,360,000	1	1,260,000	4	35,600,000	14	6,231,000	2	139,675,500	300	462,853,500
Kota Singkawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400,000

## Provinsi Kalimantan Selatan

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Balangan	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	63,693,000	70	31,430,000	30	2,235,000	1
Kota Banjarmasin	0	0	0	0	20,449,000	36	0	0	0	0	0	0
Kota Banjar Baru	46,260,000	120	150,000,000	30	20,830,000	80	56,700,000	100	25,760,000	60	2,300,000	1
Kab. Hulu Sungai Tengah	46,640,000	86	150,000,000	30	20,449,000	36	66,180,000	78	28,722,000	49	3,048,000	1
Kab. Hulu Sungai Selatan	46,340,000	105	150,000,000	30	0	0	70,320,000	160	18,955,000	85	3,876,000	1
Kab. Barito Kuala	46,332,400	112	150,000,000	30	0	0	69,318,445	200	22,697,130	33	4,756,585	1
Kab. Tapin	46,540,000	136	150,000,000	30	20,544,400	38	71,460,000	130	22,334,400	51	4,100,000	1
Kab. Tabalong	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	40	68,920,000	100	24,568,000	76	4,780,000	4
Kab. Banjar	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	48,864,800	80	14,970,000	60	3,300,000	1
Kab. Hulu Sungai Utara	42,325,000	100	150,000,000	30	0	0	58,293,750	150	32,025,000	100	4,800,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Balangan	4,470,000	2	23,712,000	76	32,440,000	12	4,470,000	2	126,244,000	232	485,334,000
Kota Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,449,000
Kota Banjar Baru	1,150,000	1	30,996,000	126	56,200,000	25	3,450,000	3	127,730,000	400	521,376,000
Kab. Hulu Sungai Tengah	2,598,000	1	23,700,000	79	33,810,000	15	5,196,000	2	125,440,000	268	505,783,000
Kab. Hulu Sungai Selatan	4,012,500	1	39,680,000	248	43,650,000	18	7,350,000	2	116,750,500	300	500,934,000
Kab. Barito Kuala	4,756,585	1	30,948,300	81	26,620,000	12	4,091,880	2	125,811,970	226	485,333,295
Kab. Tapin	3,550,000	1	22,500,000	90	50,920,000	30	3,550,000	2	110,250,000	330	505,748,800
Kab. Tabalong	4,050,000	2	7,200,000	24	29,400,000	12	8,100,000	4	125,452,000	300	489,559,000
Kab. Banjar	3,250,000	1	18,900,000	126	73,620,000	44	6,500,000	2	134,885,600	230	521,379,400
Kab. Hulu Sungai Utara	4,800,000	1	34,500,000	115	70,572,200	37	4,800,000	2	83,215,000	300	485,330,950

## Provinsi Kalimantan Tengah

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Sukamara	53,600,000	80	150,000,000	30	0	0	71,580,000	70	23,049,000	30	3,500,000	1
Kab. Lamandau	32,960,730	90	150,000,000	30	0	0	68,685,941	105	24,544,985	36	11,880,000	4
Kab. Barito Selatan	60,360,000	80	150,000,000	30	0	0	60,240,000	70	31,969,000	30	2,600,000	1
Kab. Gunung Mas	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	58,945,000	70	31,600,000	30	7,200,000	1
Kab. Kapuas	46,580,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Seruyan	101,830,000	80	150,000,000	30	0	0	47,514,000	70	23,180,000	30	2,400,000	1
Kab. Katingan	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	70,605,000	90	24,940,000	30	2,200,000	1
Kota Palangka Raya	39,501,000	96	150,000,000	30	22,240,000	43	88,968,000	160	17,620,000	31	1,050,000	1
Kab. Kotawaringin Timur	116,640,000	100	80,000,000	16	20,449,000	36	61,600,000	100	35,595,000	43	550,000	1
Kab. Kotawaringin Barat	41,340,000	80	150,000,000	30	25,750,000	36	33,510,000	70	22,601,100	70	7,125,000	1
Kab. Murung Raya	65,362,000	80	150,000,000	30	0	0	45,006,000	80	44,601,000	30	4,200,000	1
Kab. Barito Timur	47,975,500	100	148,500,000	33	0	0	65,880,000	100	19,785,000	30	3,075,000	1
Kab. Barito Utara	57,320,000	80	150,000,000	30	0	0	29,589,000	70	96,565,000	36	3,675,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGURKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGURKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGURKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGURKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Sukamara	1,350,000	1	19,200,000	30	41,441,000	35	3,050,000	2	102,340,000	200	469,110,000
Kab. Lamandau	4,230,000	1	8,352,000	32	71,546,324	31	8,460,000	2	88,450,020	308	469,110,000
Kab. Barito Selatan	2,325,000	1	21,216,000	24	63,200,000	20	4,650,000	2	72,550,000	200	469,110,000
Kab. Gunung Mas	5,250,000	1	12,960,000	24	23,473,000	12	7,590,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Kapuas	4,095,000	1	7,920,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,080,000	200	469,110,000
Kab. Seruyan	2,150,000	1	4,200,000	25	60,046,000	25	4,300,000	2	73,490,000	200	469,110,000
Kab. Katingan	550,000	1	22,140,000	24	25,483,000	20	1,100,000	2	125,452,000	220	469,110,000
Kota Palangka Raya	1,825,000	1	34,860,000	83	26,000,000	12	3,425,000	2	120,288,000	216	505,777,000
Kab. Kotawaringin Timur	825,000	1	29,760,000	39	17,038,000	15	1,650,000	2	125,452,000	360	489,559,000
Kab. Kotawaringin Barat	6,915,000	2	34,275,000	175	62,950,000	50	6,750,000	2	114,555,000	300	505,771,100
Kab. Murung Raya	7,220,000	1	18,480,000	30	23,400,000	13	3,610,000	2	107,231,000	200	469,110,000
Kab. Barito Timur	3,713,000	1	12,480,000	32	29,499,982	19	6,990,000	2	124,968,000	368	462,866,482
Kab. Barito Utara	2,837,500	1	15,270,000	11	73,240,000	30	2,837,500	2	69,600,000	200	500,934,000

## Provinsi Kalimantan Timur

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Paser	46,640,000	90	150,000,000	30	20,449,000	36	60,334,500	120	34,690,500	34	2,720,000	1
Kab. Penajam Paser Utara	19,478,000	83	150,000,000	30	19,780,000	44	33,950,000	70	14,800,000	70	2,700,000	1
Kota Balikpapan	46,701,500	90	150,000,000	30	20,375,000	60	89,280,000	180	6,562,500	30	2,000,000	1
Kab. Kutai Timur	46,626,400	80	150,000,000	30	20,409,800	37	56,778,600	100	39,141,000	57	1,829,000	1
Kab. Kutai Kartanegara	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	60,130,000	70	32,600,000	32	5,015,000	1
Kota Bontang	51,646,000	80	150,000,000	30	0	0	63,038,000	70	13,560,000	70	2,050,000	2
Kab. Berau	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	40	63,722,400	70	15,315,000	70	3,890,000	1
Kab. Kutai Barat	37,122,200	40	150,000,000	30	39,450,000	39	56,412,900	70	26,448,000	30	3,550,000	1
Kota Samarinda	46,640,000	100	150,000,000	30	20,449,000	50	60,960,000	70	32,745,000	100	4,040,000	1
Kab. Mahakam Hulu	46,640,000	30	150,000,000	30	0	0	101,120,000	70	29,583,000	30	2,569,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Paser	1,360,000	1	19,800,000	24	25,393,000	12	2,720,000	2	125,452,000	420	489,559,000
Kab. Penajam Paser Utara	1,950,000	1	67,950,000	130	55,075,000	12	3,900,000	2	151,800,000	200	521,383,000
Kota Balikpapan	4,375,000	1	700,000	168	84,676,000	40	4,375,000	2	125,442,000	240	534,487,000
Kab. Kutai Timur	1,762,000	1	23,331,000	88	36,124,000	12	4,281,000	2	125,500,100	300	505,782,900
Kab. Kutai Kartanegara	3,455,000	1	26,135,000	76	28,997,000	12	6,910,000	2	125,452,000	220	505,783,000
Kota Bontang	1,725,000	1	14,175,000	126	86,200,000	30	3,450,000	2	115,090,000	250	500,934,000
Kab. Berau	3,720,000	1	36,520,000	166	55,010,000	20	5,410,000	2	105,106,600	300	505,783,000
Kab. Kutai Barat	3,720,000	1	8,800,000	30	29,196,000	12	7,100,000	2	127,759,900	300	489,559,000
Kota Samarinda	3,705,000	1	37,260,000	138	32,722,000	14	7,410,000	2	125,452,000	255	521,383,000
Kab. Mahakam Hulu	710,000	1	17,900,000	5	26,200,000	12	1,687,000	1	87,085,000	200	463,494,000

## Provinsi Kalimantan Utara

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Tana Tidung	24,820,000	25	150,000,000	30	0	0	73,864,000	80	20,100,000	30	3,780,000	1
Kab. Nunukan	46,640,000	60	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Buhungan	36,088,000	80	150,000,000	30	22,054,150	44	62,497,850	70	28,040,000	60	1,945,000	1
Kab. Malinau	46,260,000	80	150,000,000	30	0	0	62,206,000	70	26,575,000	35	4,175,000	1
Kota Tarakan	53,800,000	80	150,000,000	30	16,050,000	49	54,120,000	80	34,383,000	68	2,200,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Tana Tidung	3,465,000	1	7,616,000	28	54,540,000	20	6,930,000	2	102,178,000	200	447,293,000
Kab. Nunukan	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Buhungan	3,890,000	2	21,060,000	26	41,428,000	15	3,890,000	2	118,666,000	248	489,559,000
Kab. Malinau	4,175,000	1	7,680,000	24	26,604,000	12	7,375,000	2	134,060,000	200	469,110,000
Kota Tarakan	1,900,000	1	40,950,000	182	29,280,000	12	3,800,000	2	119,300,000	244	505,783,000



## Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Bangka Tengah	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	78	24,405,000	60	4,420,000	1
Kab. Belitung	51,010,000	80	150,000,000	30	20,449,000	50	57,900,000	90	31,811,000	144	3,776,000	1
Kota Pangkal Pinang	41,700,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	61,000,000	70	7,890,000	30	600,000	1
Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan	52,653,500	90	150,000,000	30	11,485,500	48	82,183,500	100	15,010,000	60	3,100,000	2
	45,200,000	80	150,000,000	30	0	0	45,820,000	70	28,320,000	30	6,020,000	1
Kab. Bangka Barat	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	75,500,000	70	18,955,000	30	3,290,000	1

KABUPATEN/KOT A	PAGURKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGURKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGURKA 4C	TARGE T OUTPUT 4C	PAGURKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGURKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Bangka Tengah	4,095,000	1	39,312,000	168	29,500,000	64	8,190,000	2	125,452,000	220	500,934,000
Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang	3,925,000	1	23,712,000	100	59,000,000	24	7,000,000	2	97,200,000	200	505,783,000
	600,000	1	12,600,000	84	87,100,000	40	1,200,000	2	122,644,000	300	505,783,000
Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan	3,100,000	2	20,300,000	90	36,890,000	15	3,100,000	2	127,960,500	280	505,783,000
	2,370,000	1	23,610,000	75	28,500,000	17	4,740,000	2	150,754,000	392	485,334,000
Kab. Bangka Barat	2,975,000	1	13,440,000	24	29,883,000	12	2,975,000	2	125,452,000	200	469,110,000

## Provinsi Kepulauan Riau

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kota Tanjung Pinang	46,540,000	160	150,000,000	30	20,449,000	140	69,857,000	158	24,405,000	200	4,312,000	2
Kab. Karimun	41,540,000	80	150,000,000	30	20,449,000	50	47,620,000	70	22,030,000	30	3,945,000	1
Kab. Kepulauan Anambas	46,640,000	13	150,000,000	47	0	0	64,600,000	70	28,725,000	34	4,420,000	1
Kab. Lingga	45,200,000	80	150,000,000	30	0	0	76,737,000	70	30,369,000	30	4,511,000	2
Kota Batam	44,180,000	150	120,990,000	30	28,080,000	60	130,000,000	185	42,300,000	114	750,000	1
Kab. Natuna	46,094,000	35	150,000,000	70	0	0	73,892,000	70	21,809,000	30	2,600,000	1
Kab. Bintan	59,091,378	90	135,000,000	30	0	0	67,945,100	80	29,173,350	80	3,945,800	2

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kota Tanjung Pinang	3,480,000	3	39,300,000	393	29,500,000	12	8,088,000	4	125,452,000	460	521,383,000
Kab. Karimun	3,945,000	1	47,625,000	70	40,650,000	21	7,890,000	2	103,865,000	240	489,559,000
Kab. Kepulauan Anambas	4,250,000	1	22,500,000	90	32,247,000	12	6,500,000	2	125,452,000	200	485,334,000
Kab. Lingga	2,374,000	2	47,250,000	126	30,714,000	12	3,858,000	2	109,920,000	200	500,933,000
Kota Batam	750,000	1	30,280,000	126	36,903,000	20	1,700,000	2	85,450,000	200	521,383,000
Kab. Natuna	2,325,000	1	35,100,000	53	59,000,000	24	4,650,000	2	73,640,000	200	469,110,000
Kab. Bintan	3,659,350	2	24,300,000	75	29,500,000	12	7,318,700	2	125,386,435	200	485,320,113

## Provinsi Lampung

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Lampung Utara	39,240,000	100	150,000,000	30	19,583,000	36	62,790,000	105	16,450,000	45	2,080,000	2
Kota Bandar Lampung	46,250,000	225	150,000,000	30	23,185,000	86	64,400,000	180	26,250,000	100	3,625,000	5
Kab. Mesuji	43,560,000	88	150,000,000	30	0	0	67,370,000	105	23,836,000	35	2,240,000	1
Kab. Tanggamus	38,375,000	90	150,000,000	30	0	0	41,400,000	70	19,860,000	30	2,175,000	1
Kab. Way Kanan	46,600,500	105	150,000,000	30	0	0	68,580,000	105	24,065,000	50	5,100,000	2
Kota Metro	44,156,000	80	150,000,000	30	14,835,000	55	95,720,000	105	14,060,000	60	2,880,000	2
Kab. Tulangbawang	56,640,000	200	140,000,000	30	0	0	60,388,000	90	34,553,000	40	2,900,000	1
Kab. Pringsewu	45,078,000	180	150,000,000	30	19,288,000	53	60,800,000	180	31,575,000	90	5,736,000	2
Kab. Lampung Timur	41,440,000	110	155,200,000	40	20,449,000	36	53,417,500	105	40,202,500	60	4,125,000	1
Kab. Lampung Selatan	38,519,000	80	150,000,000	30	27,480,000	52	51,798,000	80	34,935,000	62	1,845,000	1
Kab. Lampung Barat	22,636,000	40	150,000,000	30	0	0	91,484,000	150	18,725,000	68	1,330,000	2
Kab. Lampung Tengah	46,640,000	100	150,000,000	30	20,449,000	72	35,825,000	80	51,720,000	24	10,200,000	14
Kab. Pesawaran	47,460,000	80	150,000,000	30	0	0	70,590,000	100	18,940,000	45	3,150,000	1
Kab. Tulang Bawang Barat	55,010,000	110	144,000,000	40	0	0	72,640,000	100	17,679,100	30	2,175,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Lampung Utara	1,500,000	1	11,400,000	76	72,800,000	30	3,000,000	2	126,940,000	350	505,783,000
Kota Bandar Lampung	2,190,000	3	13,440,000	126	56,540,000	24	3,910,000	4	131,593,000	500	521,383,000
Kab. Mesuji	1,866,000	1	45,000,000	75	29,760,000	12	5,832,000	2	115,870,000	300	485,334,000
Kab. Tanggamus	4,400,000	1	62,100,000	126	86,040,000	36	8,450,000	2	88,134,000	240	500,934,000
Kab. Way Kanan	2,725,000	1	26,250,000	75	31,400,000	14	5,100,000	2	125,513,500	300	485,334,000
Kota Metro	2,880,000	2	11,250,000	75	44,280,000	20	5,760,000	4	119,962,000	275	505,783,000
Kab. Tulangbawang	5,400,000	2	22,750,000	75	29,747,000	12	7,600,000	2	125,356,000	350	485,334,000
Kab. Pringsewu	5,424,000	2	24,000,000	80	37,026,000	15	6,456,000	2	120,400,000	400	505,783,000
Kab. Lampung Timur	6,480,000	2	53,900,000	190	28,121,000	12	5,700,000	2	125,452,000	300	534,487,000
Kab. Lampung Selatan	945,000	1	26,700,000	54	74,375,000	30	2,400,000	2	80,559,000	280	489,556,000
Kab. Lampung Barat	1,130,000	1	23,355,000	108	31,500,000	30	1,560,000	2	127,390,000	250	469,110,000
Kab. Lampung Tengah	8,450,000	1	20,700,000	126	43,497,000	12	8,450,000	2	125,452,000	340	521,383,000
Kab. Pesawaran	3,150,000	1	13,900,000	40	29,720,000	12	6,300,000	2	125,900,000	400	469,110,000
Kab. Tulang Bawang Barat	2,850,000	1	8,000,000	19	31,631,000	15	4,130,000	2	129,746,900	220	467,862,000

**Provinsi Maluku**

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kota Ambon	46,611,512	140	120,600,000	36	20,477,488	50	76,965,000	135	11,073,000	35	4,764,000	1
Kab. Seram Bagian Timur	46,632,000	47	150,000,000	30	0	0	71,180,000	70	28,005,000	30	2,160,000	1
Kab. Kepulauan Aru	56,115,000	80	136,500,000	30	0	0	68,200,000	70	37,275,000	30	3,630,000	1
Kab. Maluku Tenggara Barat	45,310,000	80	150,000,000	30	0	0	68,830,000	61	24,500,000	30	4,404,000	1
Kab. Maluku Barat Daya	112,230,000	40	84,410,000	30	0	0	65,110,500	35	24,225,000	15	5,715,000	1
Kab. Seram Bagian Barat	55,260,000	80	150,000,000	30	0	0	68,180,000	70	23,327,000	30	4,120,000	1
Kab. Maluku Tenggara	46,640,000	44	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Maluku Tengah	49,850,000	80	150,000,000	30	24,340,000	36	39,920,000	70	46,050,000	30	3,400,000	1
Kab. Buru	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	63,870,000	86	24,055,000	45	9,820,000	2
Kab. Buru Selatan	51,234,000	44	150,000,000	30	0	0	70,100,000	40	22,310,000	36	4,000,000	1
Kota Tual	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kota Ambon	2,700,000	1	5,740,000	30	70,100,000	26	5,076,000	2	125,452,000	225	489,559,000
Kab. Seram Bagian Timur	2,160,000	1	5,400,000	18	29,500,000	12	4,920,000	2	127,281,000	200	467,238,000
Kab. Kepulauan Aru	7,260,000	2	8,070,000	24	30,500,000	12	7,350,000	2	114,210,000	200	469,110,000
Kab. Maluku Tenggara Barat	4,024,000	1	3,000,000	5	29,400,000	12	8,156,000	2	125,448,000	200	463,072,000
Kab. Maluku Barat Daya	5,715,000	1	69,830,000	15	30,200,000	12	12,430,000	2	55,500,500	60	465,366,000
Kab. Seram Bagian Barat	4,420,000	2	9,360,000	15	29,500,000	12	4,420,000	2	117,403,000	200	465,990,000
Kab. Maluku Tenggara	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Maluku Tengah	3,400,000	1	25,375,000	22	29,500,000	12	6,800,000	2	110,300,000	200	488,935,000
Kab. Buru	3,100,000	1	12,000,000	30	27,973,000	12	6,200,000	2	125,452,000	282	469,110,000
Kab. Buru Selatan	3,975,000	1	1,200,000	4	29,500,000	12	7,950,000	2	122,601,000	200	462,870,000
Kota Tual	4,095,000	1	6,240,000	20	29,500,000	20	8,190,000	2	125,452,000	320	467,862,000

## Provinsi Maluku Utara

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Halmahera Utara	51,400,000	80	150,000,000	30	0	0	70,100,000	70	24,108,000	30	4,450,000	1
Kab. Pulau Morotai	45,600,000	52	150,000,000	30	0	0	64,975,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kota Tidore Kepulauan	50,280,000	80	150,000,000	30	0	0	62,100,000	70	48,000,000	40	330,000	1
Kab. Kepulauan Sula	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Pulau Taliabu	76,640,000	80	120,000,000	30	0	0	45,775,000	75	43,770,000	45	8,200,000	20
Kab. Halmahera Selatan	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Halmahera Timur	32,700,000	35	150,000,000	30	0	0	56,620,000	70	25,793,000	30	6,540,000	1
Kab. Halmahera Tengah	52,596,000	30	150,000,000	30	0	0	49,996,000	70	18,082,000	30	1,426,000	1
Kota Ternate	46,622,520	80	150,000,000	30	20,355,930	51	68,704,080	70	24,245,160	70	4,358,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Halmahera Utara	4,450,000	1	7,800,000	24	28,900,000	12	8,900,000	2	119,002,000	200	469,110,000
Kab. Pulau Morotai	4,010,000	1	11,400,000	14	33,310,000	12	8,020,000	2	119,850,000	200	465,990,000
Kota Tidore Kepulauan	3,055,000	1	23,150,000	24	18,875,000	12	6,110,000	2	107,210,000	200	469,110,000
Kab. Kepulauan Sula	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	280	469,110,000
Kab. Pulau Taliabu	5,075,000	1	1,872,000	24	29,500,000	12	7,210,000	2	125,452,000	200	463,494,000
Kab. Halmahera Selatan	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Halmahera Timur	6,255,000	1	22,200,000	25	28,000,000	15	12,510,000	2	125,372,000	200	465,990,000
Kab. Halmahera Tengah	3,830,000	1	15,600,000	24	42,000,000	15	7,420,000	2	128,160,000	200	469,110,000
Kota Ternate	3,893,000	1	34,020,000	126	36,000,000	15	7,706,000	2	125,477,340	212	521,382,030



## Provinsi Nusa Tenggara Barat

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Lombok Tengah	46,640,000	270	150,000,000	30	20,450,000	45	68,920,000	70	26,721,000	45	4,800,000	2
Kab. Lombok Barat	46,640,000	210	150,000,000	30	20,449,000	38	68,282,700	186	25,524,800	82	3,937,500	3
Kab. Sumbawa	46,647,100	100	150,000,000	30	20,449,000	48	65,131,600	88	27,700,700	88	4,912,500	3
Kab. Lombok Timur	28,070,000	120	150,000,000	30	12,974,000	40	76,059,000	200	27,890,000	134	996,000	1
Kota Mataram	46,640,000	90	150,000,000	30	20,449,000	40	68,920,000	80	24,405,000	100	4,420,000	1
Kab. Bima	36,032,500	80	150,000,000	30	10,610,000	42	61,812,500	70	7,237,750	30	3,400,000	1
Kab. Sumbawa Barat	48,520,000	120	150,000,000	30	0	0	49,630,000	160	22,240,000	80	6,300,000	4
Kab. Lombok Utara	48,640,000	102	148,000,000	37	0	0	64,302,500	110	27,397,500	165	6,045,000	3
Kab. Dompu	34,678,000	103	150,000,000	30	0	0	149,236,600	280	18,542,400	56	3,780,000	3
Kota Bima	33,735,200	80	150,000,000	30	32,279,600	47	45,635,000	70	37,005,000	60	1,875,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGURKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGURKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGURKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGURKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Lombok Tengah	4,800,000	2	39,300,000	131	29,500,000	12	4,800,000	2	125,452,000	230	521,383,000
Kab. Lombok Barat	3,880,000	2	29,857,000	98	24,000,000	22	7,760,000	2	125,452,000	270	505,783,000
Kab. Sumbawa	3,415,000	2	23,400,000	90	35,260,000	20	3,415,000	2	125,451,900	306	505,782,800
Kab. Lombok Timur	3,320,000	4	4,600,000	30	56,300,000	35	3,320,000	4	126,030,000	520	489,559,000
Kota Mataram	4,095,000	1	39,312,000	254	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	264	521,383,000
Kab. Bima	6,350,000	2	11,532,750	76	29,300,000	12	6,350,000	2	183,157,500	400	505,783,000
Kab. Sumbawa Barat	2,250,000	2	15,840,000	80	101,600,000	40	2,250,000	2	70,480,000	240	469,110,000
Kab. Lombok Utara	5,090,000	2	18,743,000	90	20,350,000	12	5,090,000	2	125,452,000	255	469,110,000
Kab. Dompu	4,530,000	2	16,760,000	162	28,080,000	12	6,642,000	2	88,685,000	300	500,934,000
Kota Bima	1,740,000	2	40,500,000	75	44,982,000	16	1,740,000	2	100,067,200	200	489,559,000

## Provinsi Nusa Tenggara Timur

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Manggarai	46,096,000	100	150,000,000	30	54,600,000	42	30,139,000	70	48,468,000	45	2,800,000	2
Kab. Sumba Barat	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	83	24,405,000	30	4,420,000	2
Kab. Kupang	37,120,000	80	150,000,000	30	0	0	47,700,000	80	16,200,000	36	8,100,000	2
Kab. Sumba Barat Daya	51,000,000	90	150,000,000	30	0	0	67,225,000	70	26,492,000	35	3,850,000	1
Kab. Ngada	46,208,800	100	150,000,000	30	0	0	69,443,600	80	13,285,000	35	5,710,000	2
Kab. Timor Tengah Utara	45,637,000	80	150,000,000	30	0	0	67,895,000	70	24,000,000	30	5,850,000	1
Kab. Lembata	40,620,850	160	150,000,000	30	0	0	57,346,280	100	27,129,400	100	2,286,400	1
Kab. Sabu Raijua	57,560,000	80	135,000,000	25	0	0	54,700,000	70	28,185,000	30	1,900,000	2
Kab. Belu	47,650,000	140	150,000,000	30	20,924,000	39	51,420,000	98	38,067,000	98	3,200,000	2
Kab. Sikka	42,540,200	110	150,000,000	30	0	0	34,904,600	70	29,486,600	40	3,800,000	2
Kab. Flores Timur	44,504,000	80	150,000,000	30	0	0	57,003,500	70	37,220,000	30	1,625,000	1
Kab. Ende	46,521,840	80	150,000,000	30	0	0	71,407,270	70	23,680,760	35	2,860,000	1
Kota Kupang	50,736,200	86	150,000,000	60	19,096,000	90	62,148,200	70	31,178,200	176	3,168,000	4
Kab. Alor	46,072,000	80	150,000,000	30	0	0	69,212,000	80	21,296,000	60	4,990,000	1

KABUPATEN/KOT A	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Manggarai	2,400,000	4	54,750,000	70	32,000,000	25	6,400,000	4	61,906,000	200	489,559,000
Kab. Sumba Barat	5,600,000	2	14,400,000	24	23,673,000	12	5,600,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Kupang	4,050,000	1	22,554,000	75	52,800,000	24	8,100,000	2	138,710,000	218	485,334,000
Kab. Sumba Barat Daya	3,625,000	1	11,800,000	10	29,500,000	12	7,250,000	2	114,000,000	200	464,742,000
Kab. Ngada	3,080,000	2	6,900,000	30	67,650,000	24	4,326,000	2	101,882,600	300	468,486,000
Kab. Timor Tengah Utara	3,900,000	2	25,500,000	13	33,000,000	75	4,100,000	2	125,452,000	200	485,334,000
Kab. Lembata	2,286,400	1	25,320,000	100	79,090,000	47	3,492,800	2	81,537,870	300	469,110,000
Kab. Sabu Raijua	1,675,000	1	18,940,000	25	34,780,000	12	3,350,000	2	133,020,000	450	469,110,000
Kab. Belu	3,500,000	2	10,000,000	30	53,400,000	20	3,500,000	2	106,650,000	300	488,311,000
Kab. Sikka	3,800,000	2	38,800,000	86	54,245,300	27	3,800,000	2	107,733,300	360	469,110,000
Kab. Flores Timur	1,625,000	1	29,640,000	24	28,450,000	14	4,875,000	3	114,167,500	200	469,110,000
Kab. Ende	3,460,000	1	12,000,800	28	30,300,000	18	3,512,000	2	125,367,330	210	469,110,000
Kota Kupang	1,780,000	4	38,193,600	218	29,495,000	17	12,183,000	3	123,404,800	336	521,383,000
Kab. Alor	3,740,000	1	15,000,000	30	33,900,000	14	7,480,000	2	117,420,000	202	469,110,000

**Provinsi Papua**

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Kepulauan Yapen	49,020,000	80	150,000,000	30	0	0	62,000,000	70	22,875,000	30	4,500,000	1
Kab. Nabire	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	46	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Boven Digoel	46,640,000	40	150,000,000	30	0	0	72,845,000	70	21,950,000	30	2,950,000	1
Kab. Pegunungan Bintang	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Jayawijaya	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	70,000,000	96	18,138,000	30	6,500,000	1
Kab. Mimika	0	0	0	0	20,449,000	36	0	0	0	0	0	0
Kota Jayapura	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	51	66,911,000	85	27,234,000	85	3,600,000	1
Kab. Biak Numfor	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	71,250,000	70	24,095,000	30	2,400,000	1
Kab. Waropen	47,900,000	80	150,000,000	30	0	0	71,490,000	70	32,300,000	30	4,500,000	1
Kab. Dogiyai	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	35	4,420,000	1
Kab. Asmat	99,126,000	80	114,000,000	30	0	0	66,889,000	70	23,860,000	30	1,030,000	1
Kab. Merauke	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	59,945,000	70	37,800,000	210	0	1
Kab. Jayapura	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Mappi	124,144,000	24	150,000,000	20	0	0	68,920,000	50	24,405,000	15	4,420,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGURKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGURKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGURKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGURKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Kepulauan Yapen	3,550,000	1	10,000,000	24	20,000,000	12	7,100,000	2	140,065,000	240	469,110,000
Kab. Nabire	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	489,559,000
Kab. Boven Digoel	3,122,000	1	10,601,000	24	29,500,000	12	6,050,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Pegunungan Bintang	4,095,000	1	7,488,000	30	29,500,000	15	8,190,000	1	0	0	343,658,000
Kab. Jayawijaya	3,750,000	1	10,680,000	24	30,700,000	12	7,250,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Mimika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,449,000
Kota Jayapura	2,801,000	1	22,500,000	75	34,596,000	14	5,600,000	2	125,452,000	200	505,783,000
Kab. Biak Numfor	4,100,000	1	17,213,000	24	23,860,000	12	4,100,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Waropen	5,760,000	1	6,700,000	24	21,600,000	12	5,760,000	2	123,100,000	200	469,110,000
Kab. Dogiyai	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	24	8,190,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Asmat	1,923,000	1	1,923,000	12	31,100,000	12	2,100,000	1	78,414,000	600	420,365,000
Kab. Merauke	680,000	1	31,200,000	150	29,697,000	12	3,920,000	2	125,452,000	1,000	485,334,000
Kab. Jayapura	4,095,000	1	23,712,000	75	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	485,334,000
Kab. Mappi	4,095,000	1	52,416,000	15	29,400,000	15	8,190,000	2	0	0	465,990,000

## Provinsi Papua Barat

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Teluk Bintuni	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	82,745,000	110	10,050,000	30	4,950,000	2
Kota Sorong	45,700,000	80	150,000,000	30	41,329,000	36	64,550,000	70	14,875,000	30	4,750,000	1
Kab. Sorong Selatan	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Teluk Wondama	54,160,000	42	150,000,000	30	0	0	43,280,000	35	34,200,000	30	2,400,000	1
Kab. Raja Ampat	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Manokwari	55,000,000	95	150,000,000	30	20,288,000	36	101,366,000	70	29,760,000	30	1,253,000	1
KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA	
Kab. Teluk Bintuni	2,665,000	1	11,250,000	30	28,800,000	12	5,310,000	2	125,452,000	280	467,862,000	
Kota Sorong	5,250,000	1	36,000,000	75	20,500,000	12	6,300,000	2	116,529,000	210	505,783,000	
Kab. Sorong Selatan	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	469,110,000	
Kab. Teluk Wondama	2,400,000	1	20,200,000	10	29,100,000	12	4,800,000	2	124,202,000	200	464,742,000	
Kab. Raja Ampat	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	469,110,000	
Kab. Manokwari	1,150,000	1	11,232,000	24	27,710,000	12	1,800,000	2	90,000,000	200	489,559,000	

**Provinsi Riau**

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Kampar	53,815,000	100	150,000,000	30	23,340,000	40	69,330,000	70	21,350,000	30	4,250,000	2
Kab. Pelalawan	28,365,000	80	150,000,000	30	38,785,680	60	44,351,360	80	24,055,680	80	1,537,500	1
Kab. Siak	60,200,000	80	150,000,000	30	43,750,000	54	64,100,000	70	42,458,000	60	1,800,000	1
Kab. Rokan Hulu	36,640,000	90	150,000,000	30	20,140,000	36	41,676,000	90	23,260,000	50	7,680,000	4
Kab. Kepulauan Meranti	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	72,800,000	70	22,945,000	30	2,000,000	1
Kab. Kuantan Singingi	46,640,000	90	150,000,000	30	20,449,000	40	81,726,000	90	22,099,000	53	1,820,000	1
Kota Dumai	43,552,400	80	148,500,000	27	23,750,940	36	56,001,550	70	29,120,940	55	4,680,000	2
Kota Pekanbaru	51,312,010	80	150,000,000	30	19,545,000	36	83,202,250	84	21,435,000	30	4,280,000	2
Kab. Indragiri Hulu	46,640,000	90	150,000,000	30	20,449,000	36	66,634,000	80	30,051,000	70	1,060,000	1
Kab. Indragiri Hilir	46,000,000	80	150,000,000	30	20,050,000	72	61,346,000	70	19,605,000	31	4,170,000	3
Kab. Rokan Hilir	46,590,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	70,499,000	80	27,225,000	30	1,520,000	1
Kab. Bengkalis	42,934,000	80	150,000,000	30	19,927,500	36	68,447,000	70	21,907,500	30	1,700,000	1



KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGURKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGURKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGURKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGURKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Kampar	4,795,000	1	15,200,000	76	20,240,000	20	9,590,000	2	133,850,000	200	505,760,000
Kab. Pelalawan	1,350,000	1	20,380,000	76	88,450,000	35	1,310,000	2	107,165,680	200	505,750,900
Kab. Siak	1,725,000	1	48,000,000	75	31,500,000	12	3,450,000	2	58,800,000	200	505,783,000
Kab. Rokan Hulu	6,760,000	4	8,640,000	48	68,973,000	25	5,070,000	3	120,720,000	300	489,559,000
Kab. Kepulauan Meranti	1,750,000	1	24,700,000	76	35,547,000	12	3,500,000	2	125,452,000	200	485,334,000
Kab. Kuantan Singingi	3,460,000	2	25,200,000	84	20,339,600	12	3,440,000	2	114,385,400	240	489,559,000
Kota Dumai	2,580,000	1	35,600,940	75	29,460,000	12	7,188,000	3	125,321,600	300	505,756,370
Kota Pekanbaru	4,010,000	1	11,400,000	75	29,500,000	12	8,020,000	2	123,078,740	250	505,783,000
Kab. Indragiri Hulu	3,653,000	2	11,232,000	32	30,738,000	12	3,650,000	2	125,452,000	250	489,559,000
Kab. Indragiri Hilir	2,780,000	2	12,560,000	80	61,442,000	24	2,780,000	2	125,050,000	455	505,783,000
Kab. Rokan Hilir	3,560,000	2	27,300,000	75	29,500,000	12	5,080,000	2	124,060,000	250	505,783,000
Kab. Bengkalis	1,450,000	1	51,400,000	126	41,900,000	20	7,740,000	2	113,970,000	240	521,376,000

## Provinsi Sulawesi Barat

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Mamuju	48,194,000	80	150,000,000	30	0	0	45,058,000	70	34,240,000	34	424,000	1
Kab. Mamuju Tengah	40,710,000	100	150,000,000	30	0	0	55,469,000	70	27,769,800	30	5,200,000	1
Kab. Pasangkayu	46,611,300	80	150,000,000	30	20,449,000	40	58,827,700	70	30,677,000	31	4,000,000	4
Kab. Majene	41,250,000	80	150,000,000	30	0	0	67,930,000	70	23,385,000	30	3,750,000	3
Kab. Polewali Mandar	46,063,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	51,783,000	70	25,415,800	35	4,400,000	1
Kab. Mamasa	67,314,000	80	150,000,000	30	0	0	46,310,000	70	13,160,000	30	2,805,000	1
KABUPATEN/KOT A	PAGURKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGURKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGURKA 4C	TARGE T OUTPUT 4C	PAGURKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGURKA 5A	TARGE T OUTPUT 5A	Total Pagu RKA	
Kab. Mamuju	1,114,000	1	16,470,000	24	45,470,000	12	2,228,000	2	125,912,000	200	469,110,000	
Kab. Mamuju Tengah	2,940,000	1	7,840,000	24	48,471,000	17	5,880,000	2	124,830,000	300	469,109,800	
Kab. Pasangkayu	3,800,000	1	7,224,000	26	29,450,000	24	7,600,000	1	130,920,000	200	489,559,000	
Kab. Majene	2,850,000	2	16,380,000	24	46,400,000	20	5,852,000	4	111,313,000	200	469,110,000	
Kab. Polewali Mandar	4,095,000	1	31,700,000	35	40,078,800	18	8,010,000	2	107,564,000	200	489,558,600	
Kab. Mamasa	3,165,000	1	4,160,000	8	28,000,000	12	7,268,000	2	141,936,000	200	464,118,000	

## Provinsi Sulawesi Selatan

KABUPATEN/KOT A	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Luwu Utara	33,047,000	80	150,000,000	30	32,908,000	51	40,482,000	70	65,601,000	40	1,100,000	1
Kab. Barru	49,012,000	123	150,000,000	30	22,317,000	49	59,880,000	150	23,280,000	104	2,940,000	1
Kab. Enrekang	42,978,000	110	150,000,000	30	0	0	43,866,000	120	49,380,000	58	4,480,000	2
Kab. Gowa	46,640,000	100	150,000,000	30	20,449,000	50	75,330,000	150	19,335,000	60	3,080,000	1
Kab. Sinjai	49,250,000	160	150,000,000	30	0	0	68,790,000	90	24,390,000	45	3,440,000	1
Kab. Luwu	46,640,000	100	150,000,000	30	20,449,000	36	55,917,600	80	39,101,100	43	2,840,000	1
Kab. Tana Toraja	39,100,000	80	150,000,000	30	0	0	44,100,000	80	47,554,000	40	4,560,000	1
Kab. Kepulauan Selayar	37,820,000	80	150,000,000	30	0	0	84,060,000	100	19,190,000	100	2,655,000	1
Kab. Bulukumba	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	72,636,000	128	19,827,000	30	4,260,000	2
Kab. Maros	46,640,000	90	150,000,000	30	18,649,000	60	59,100,000	100	29,355,000	59	3,250,000	1
Kab. Luwu Timur	46,514,000	150	150,000,000	30	20,440,000	50	38,619,200	120	24,375,000	60	1,700,000	1
Kota Parepare	46,640,000	80	150,000,000	30	20,448,600	90	68,920,000	140	24,405,000	46	4,420,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGURKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGURKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGURKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGURKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Luwu Utara	1,675,000	1	55,100,000	83	54,510,000	19	4,700,000	2	66,660,000	200	505,783,000
Kab. Barru	2,940,000	1	34,500,000	100	46,480,000	26	7,100,000	2	91,110,000	300	489,559,000
Kab. Enrekang	3,760,000	2	13,000,000	27	32,960,000	12	3,760,000	2	124,888,000	368	469,072,000
Kab. Gowa	1,370,000	1	15,810,000	62	29,353,000	12	2,740,000	2	125,452,000	200	489,559,000
Kab. Sinjai	3,260,000	1	17,610,000	80	17,700,000	15	4,920,000	2	129,750,000	300	469,110,000
Kab. Luwu	2,840,000	1	24,947,000	76	34,870,000	12	2,840,000	2	125,338,300	300	505,783,000
Kab. Tana Toraja	3,225,000	1	45,600,000	52	49,131,000	12	6,900,000	2	78,940,000	200	469,110,000
Kab. Kepulauan Selayar	4,155,000	1	16,600,000	100	41,908,000	12	4,155,000	2	124,791,000	270	485,334,000
Kab. Bulukumba	4,620,000	1	11,793,000	24	28,240,000	12	4,620,000	2	126,474,000	224	489,559,000
Kab. Maros	2,250,000	1	9,000,000	60	89,900,000	38	4,500,000	2	93,139,000	200	505,783,000
Kab. Luwu Timur	1,735,000	1	52,200,000	180	38,195,800	16	2,940,000	2	129,064,000	400	505,783,000
Kota Parepare	4,095,000	1	7,488,000	50	29,500,000	36	8,190,000	2	125,452,000	500	489,558,600

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Sidenreng Rappang	19,476,000	80	150,000,000	30	0	0	24,632,000	70	9,860,000	30	1,740,000	1
Kab. Pangkajene Dan Kepulauan	30,018,000	90	150,000,000	30	30,000,000	36	29,928,000	70	24,730,000	30	1,265,000	1
Kab. Jeneponto	42,236,000	138	150,000,000	30	18,657,350	50	59,220,000	210	23,250,000	30	4,750,000	1
Kab. Bantaeng	42,568,000	80	150,000,000	30	0	0	76,229,000	90	21,700,000	90	4,480,000	1
Kab. Toraja Utara	52,324,000	80	150,000,000	30	0	0	55,874,000	70	19,392,500	30	7,470,000	1
Kota Makassar	46,560,000	94	150,000,000	30	20,449,000	72	83,080,000	100	19,525,000	74	1,300,000	1
Kab. Pinrang	46,215,000	150	150,000,000	30	20,899,000	36	47,470,000	70	23,625,000	38	5,200,000	1
Kab. Bone	46,320,000	170	150,000,000	30	20,449,050	50	72,620,000	200	20,353,950	60	3,200,000	4
Kab. Wajo	46,635,000	180	150,000,000	30	26,831,700	63	46,711,000	92	33,668,800	92	1,245,000	1
Kota Palopo	46,640,000	114	150,000,000	30	20,449,000	44	75,100,000	100	27,400,800	40	2,600,000	1
Kab. Takalar	50,726,000	80	150,000,000	30	19,820,500	44	44,526,000	80	28,990,000	100	4,500,000	1
Kab. Soppeng	46,640,000	120	150,000,000	30	20,449,000	42	69,780,000	130	25,765,000	120	2,200,000	1

KABUPATEN/KOT A	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Sidenreng Rappang	1,555,000	1	17,000,000	84	95,460,000	40	3,110,000	2	146,277,000	291	469,110,000
Kab. Pangkajene Dan Kepulauan	1,265,000	1	37,495,000	75	34,240,000	20	2,530,000	2	164,312,000	580	505,783,000
Kab. Jeneponto	3,350,000	1	12,240,000	24	47,400,000	24	4,750,000	2	123,705,386	200	489,558,736
Kab. Bantaeng	4,480,000	1	6,800,000	90	29,997,000	13	8,960,000	2	123,896,000	260	469,110,000
Kab. Toraja Utara	5,505,000	1	18,301,500	24	44,748,000	12	6,667,000	1	108,828,000	200	469,110,000
Kota Makassar	1,220,000	1	12,000,000	60	43,317,000	18	2,880,000	2	125,452,000	280	505,783,000
Kab. Pinrang	2,025,000	1	15,300,000	30	31,720,000	12	7,050,000	1	140,055,000	500	489,559,000
Kab. Bone	5,600,000	4	15,000,000	75	40,000,000	16	5,600,000	4	126,640,000	392	505,783,000
Kab. Wajo	1,245,000	1	9,270,000	30	36,670,000	12	2,490,000	2	134,792,500	690	489,559,000
Kota Palopo	2,900,000	1	30,000,000	75	28,669,000	12	5,800,000	2	116,224,200	286	505,783,000
Kab. Takalar	3,900,000	1	5,040,000	24	32,340,000	12	7,800,000	2	141,916,500	300	489,559,000
Kab. Soppeng	2,025,000	1	18,020,000	106	56,102,000	20	4,950,000	2	125,452,000	360	521,383,000

## Provinsi Sulawesi Tengah

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGU RKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGU RKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGU RKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGU RKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGU RKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Donggala	46,580,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,475,000	30	4,350,000	1
Kab. Tojo Una-una	67,472,000	80	150,000,000	30	0	0	69,160,000	70	41,745,000	30	2,190,000	1
Kota Pahu	46,617,500	90	150,000,000	30	20,300,000	73	68,899,000	140	24,390,000	75	4,415,000	2
Kab. Banggai Laut	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Banggai Kepulauan	46,640,000	95	150,000,000	30	0	0	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Morowali	46,640,000	86	150,000,000	30	20,449,000	88	56,900,000	110	32,865,000	110	7,980,000	110
Kab. Sigi	70,814,000	80	150,000,000	30	0	0	80,569,000	70	29,446,300	30	2,010,000	1
Kab. Parigi Moutong	45,920,000	100	150,000,000	30	20,825,000	36	62,900,000	80	32,505,000	30	2,460,000	1
Kab. Buol	46,560,000	100	150,000,000	30	0	0	68,546,100	70	12,360,000	50	1,299,000	1
Kab. Poso	46,640,000	100	150,000,000	30	20,449,000	60	49,565,000	100	44,880,000	70	3,800,000	1
Kab. Banggai	43,470,000	80	150,000,000	30	23,619,000	36	66,760,000	70	26,380,000	30	4,605,000	1
Kab. Morowali Utara	41,405,000	85	150,000,000	30	0	0	41,536,000	80	45,260,000	30	2,370,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGURKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGURKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGURKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGURKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Donggala	4,025,000	1	7,680,000	24	29,518,000	12	8,050,000	2	125,512,000	200	469,110,000
Kab. Tojo Una-una	1,905,000	1	39,300,000	75	29,500,000	12	3,810,000	2	80,252,000	200	485,334,000
Kota Palu	3,985,000	2	24,000,000	80	29,527,000	18	7,970,000	4	124,429,500	240	504,533,000
Kab. Banggai Laut	3,175,000	1	7,488,000	24	32,260,000	12	6,350,000	2	125,452,000	200	469,110,000
Kab. Banggai Kepulauan	4,095,000	1	6,240,000	20	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	467,862,000
Kab. Morowali	5,076,000	75	15,322,000	75	31,644,000	19	13,455,000	75	125,452,000	200	505,783,000
Kab. Sigi	1,860,000	1	27,000,000	75	19,680,000	12	3,720,000	2	100,234,700	200	485,334,000
Kab. Parigi Moutong	2,170,000	1	8,520,000	24	34,802,000	14	4,340,000	2	125,117,000	330	489,559,000
Kab. Buol	1,310,000	1	13,720,000	60	49,142,000	32	1,310,000	1	124,859,680	200	469,106,780
Kab. Poso	3,350,000	1	28,720,000	80	29,577,000	12	3,350,000	2	125,452,000	320	505,783,000
Kab. Banggai Kab. Morowali Utara	3,684,000	1	24,945,000	75	29,500,000	12	7,368,000	2	125,452,000	200	505,783,000
	7,740,000	1	16,210,000	24	35,640,000	16	7,740,000	2	121,190,000	210	469,091,000



**Provinsi Sulawesi Tenggara**

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Kolaka Timur	45,522,000	80	150,000,000	30	0	0	54,990,000	70	25,130,000	30	2,300,000	1
Kab. Kolaka	44,600,000	80	150,000,000	30	22,489,000	36	73,900,000	70	21,220,000	40	1,225,000	1
Kab. Buton Tengah	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,160,000	70	25,345,000	36	4,240,000	1
Kab. Buton Selatan	46,640,000	108	150,000,000	30	0	0	66,600,000	70	24,690,000	30	6,455,000	1
Kab. Bombana	80,200,000	80	150,000,000	30	24,155,000	37	82,400,000	80	34,395,000	40	2,600,000	1
Kab. Wakatobi	47,356,000	80	150,000,000	30	0	0	81,130,000	70	12,324,000	33	3,000,000	1
Kab. Konawe Selatan	54,011,200	80	150,000,000	30	0	0	91,209,200	80	20,682,375	30	3,760,000	1
Kab. Buton	51,930,000	96	150,000,000	30	0	0	55,450,000	70	36,257,000	30	5,200,000	1
Kota Baubau	23,924,000	80	150,000,000	30	34,948,900	60	37,780,000	70	41,430,000	40	4,260,000	1
Kab. Konawe	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	48	63,857,000	70	24,300,000	30	4,400,000	1
Kota Kendari	46,640,000	99	150,000,000	30	20,449,000	90	111,000,000	120	11,319,000	30	1,600,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Kolaka Timur	4,300,000	1	4,600,000	24	29,500,000	14	6,450,000	2	146,318,000	200	469,110,000
Kab. Kolaka	2,025,000	1	12,000,000	30	29,500,000	12	5,250,000	2	127,350,000	224	489,559,000
Kab. Buton Tengah	3,530,000	1	9,400,000	36	29,283,000	12	7,060,000	2	125,452,000	228	469,110,000
Kab. Buton Selatan	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	15	8,190,000	2	125,452,000	48	469,110,000
Kab. Bombana	2,700,000	1	30,935,000	40	25,000,000	15	6,000,000	2	51,174,000	200	489,559,000
Kab. Wakatobi	3,000,000	1	10,200,000	33	23,800,000	14	5,000,000	2	133,300,000	200	469,110,000
Kab. Konawe Selatan	3,760,000	1	39,960,000	148	35,255,000	16	7,520,000	2	94,774,400	220	500,932,175
Kab. Buton	3,800,000	1	19,188,000	24	23,235,000	12	3,800,000	2	120,250,000	210	469,110,000
Kota Baubau	6,390,000	1	23,850,000	53	41,073,000	23	4,260,000	2	121,643,100	200	489,559,000
Kab. Konawe	4,080,000	1	12,691,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	220	489,559,000
Kota Kendari	1,325,000	1	32,000,000	160	28,600,000	12	2,650,000	2	100,200,000	200	505,783,000

## Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Bolaang Mongondow Timur	46,574,000	80	150,000,000	30	0	0	45,310,000	80	26,090,000	70	4,419,000	1
Kota Kotamobagu	42,517,600	80	150,000,000	30	23,703,600	49	33,532,600	70	24,800,000	30	3,850,000	1
Kab. Minahasa	46,350,000	80	150,000,000	30	20,449,050	36	58,350,000	120	13,663,950	30	4,125,000	1
Kab. Minahasa Utara	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	59,130,000	72	21,116,000	31	3,380,000	1
Kota Manado	46,640,000	90	150,000,000	30	20,449,000	50	77,400,000	140	16,205,000	30	4,140,000	2
Kota Tomohon	46,460,000	80	150,000,000	30	0	0	47,850,000	70	34,530,000	45	4,200,000	2
Kab. Bolaang Mongondow	56,100,000	80	150,000,000	30	0	0	32,500,000	70	23,244,000	30	4,400,000	1
Kota Bitung	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	85,460,000	60	23,430,000	30	4,420,000	1
Kab. Kepulauan Talaud	46,580,000	55	150,000,000	30	0	0	62,980,000	31	31,186,000	31	4,400,000	1
Kab. Minahasa Selatan	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	68,750,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Bolaang Mongondow Utara	46,639,980	84	150,000,000	30	0	0	69,997,200	114	24,122,800	52	3,625,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Bolaang Mongondow Timur	3,969,000	1	5,500,000	70	97,480,000	43	7,938,000	1	81,830,000	200	469,110,000
Kota Kotamobagu	5,420,000	1	29,700,000	132	85,200,000	36	15,120,000	2	75,715,200	200	489,559,000
Kab. Minahasa	4,125,000	1	26,100,000	87	59,020,000	53	8,250,000	2	130,950,000	250	521,383,000
Kab. Minahasa Utara	3,380,000	1	15,750,000	35	49,710,000	22	6,760,000	2	113,244,000	222	469,110,000
Kota Manado	6,300,000	2	39,600,000	132	30,847,000	13	4,350,000	2	125,452,000	232	521,383,000
Kota Tomohon	3,920,000	2	50,625,000	75	34,800,000	16	3,360,000	3	109,589,000	210	485,334,000
Kab. Bolaang Mongondow	4,400,000	1	21,000,000	30	54,066,000	30	8,800,000	2	114,600,000	200	469,110,000
Kota Bitung	4,180,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	1	109,802,000	200	469,110,000
Kab. Kepulauan Talaud	3,690,000	1	12,800,000	9	24,624,000	12	3,030,000	1	125,452,000	200	464,742,000
Kab. Minahasa Selatan	4,000,000	1	7,400,000	37	29,500,000	15	8,190,000	2	125,805,000	210	469,110,000
Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,531,250	1	25,500,000	85	32,452,739	13	5,013,000	2	125,452,000	399	485,333,969

## Provinsi Sumatera Barat

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Solok Selatan	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	68,920,000	70	24,405,000	45	4,420,000	1
Kota Payakumbuh	46,640,000	120	150,000,000	30	20,449,000	100	68,920,000	80	24,405,000	120	4,420,000	4
Kab. Lima Puluh Kota	46,640,000	90	150,000,000	30	20,449,000	36	67,427,000	80	28,230,000	55	2,088,000	1
Kab. Agam	27,093,000	80	150,000,000	30	24,725,000	45	81,662,400	70	42,897,700	30	4,125,000	1
Kota Padang	56,620,000	120	148,000,000	37	21,667,000	50	76,542,500	105	15,047,500	50	1,780,000	1
Kota Sawah Lunto	56,920,000	100	150,000,000	30	0	0	79,500,000	90	23,789,000	90	4,100,000	4
Kab. Kepulauan Mentawai	45,796,000	80	150,000,000	30	0	0	57,120,000	70	51,300,000	40	1,920,000	2
Kab. Padang Pariaman	20,040,000	90	148,000,000	37	0	0	32,700,000	70	14,625,000	30	1,765,000	1
Kab. Pasaman	46,548,000	162	150,000,000	30	0	0	65,992,000	158	25,200,000	81	4,200,000	2
Kota Solok	37,925,000	160	150,000,000	30	0	0	119,800,000	100	14,771,000	50	3,650,000	2
Kab. Pasaman Barat	29,650,000	80	150,000,000	30	37,439,000	80	68,100,000	115	29,195,000	30	450,000	1
Kab. Pesisir Selatan	32,931,000	100	150,000,000	30	31,074,000	50	26,345,000	80	30,482,500	80	427,500	1
Kota Paniaian	46,584,000	80	150,000,000	30	0	0	62,600,000	70	10,852,000	30	3,420,000	3
Kab. Solok	90,230,000	80	148,000,000	37	0	0	69,670,000	80	21,588,000	35	875,000	1
Kab. Dharmasraya	13,460,000	80	150,000,000	30	20,700,000	36	50,468,000	160	46,692,000	30	1,060,000	1
Kota Bukittinggi	64,960,000	160	150,000,000	30	13,583,000	50	106,600,000	160	13,224,000	60	3,224,000	2
Kab. Tanah Datar	46,442,000	200	150,000,000	30	20,391,000	53	51,662,000	135	43,950,000	100	2,891,000	2
Kab. Sijunjung	48,654,700	80	150,000,000	30	0	0	71,618,800	80	17,642,950	45	780,450	1
Kota Padang Panjang	43,420,000	80	115,000,000	30	0	0	78,895,000	75	35,400,000	80	1,600,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Solok Selatan	4,095,000	1	7,488,000	24	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	489,559,000
Kota Payakumbuh	4,095,000	4	23,580,000	131	35,774,500	40	2,047,500	4	125,452,000	200	505,783,000
Kab. Lima Puluh Kota	1,566,000	1	36,450,000	75	29,042,000	25	3,132,000	2	120,759,000	280	505,783,000
Kab. Agam	4,125,000	1	61,838,900	168	17,040,000	24	8,250,000	2	112,730,000	200	534,487,000
Kota Padang	5,080,000	2	42,000,000	168	64,500,000	30	5,080,000	2	127,670,000	300	563,987,000
Kota Sawah Lunto	5,125,000	5	13,500,000	90	53,780,000	50	6,570,000	6	92,050,000	300	485,334,000
Kab. Kepulauan Mentawai	1,920,000	2	35,040,000	75	28,560,000	12	1,920,000	2	111,758,000	200	485,334,000
Kab. Padang Pariaman	1,735,000	1	37,000,000	100	14,100,000	12	3,270,000	2	212,000,000	600	485,235,000
Kab. Pasaman	3,225,000	2	10,500,000	35	29,530,000	12	6,000,000	2	127,915,000	274	469,110,000
Kota Solok	2,550,000	2	11,250,000	50	57,120,000	24	2,550,000	2	69,494,000	200	469,110,000
Kab. Pasaman Barat	600,000	1	62,197,000	126	17,100,000	12	1,200,000	2	125,452,000	330	521,383,000
Kab. Pesisir Selatan	741,000	2	31,038,000	60	120,400,000	52	855,000	2	65,265,000	200	489,559,000
Kota Pariaman	3,500,000	2	7,800,000	78	42,890,000	40	7,000,000	4	134,464,000	560	469,110,000
Kab. Solok	525,000	1	33,750,000	75	20,894,000	12	1,400,000	2	98,402,000	200	485,334,000
Kab. Dharmasraya	1,060,000	1	52,542,000	88	39,197,000	40	1,060,000	2	129,544,000	440	505,783,000
Kota Bukittinggi	3,224,000	2	10,000,000	100	14,720,000	12	6,448,000	4	119,800,000	240	505,783,000
Kab. Tanah Datar	2,891,000	2	41,400,000	126	33,870,000	30	2,891,000	2	124,995,000	600	521,383,000
Kab. Sijunjung	1,941,200	2	43,200,000	48	44,616,000	18	2,081,200	2	88,574,700	300	469,110,000
Kota Padang Panjang	1,080,000	1	31,500,000	90	43,875,000	35	5,040,000	3	113,300,000	270	469,110,000

## Provinsi Sumatera Selatan

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Lahat	49,240,000	104	146,850,000	33	0	0	68,752,000	104	24,440,250	33	4,616,000	1
Kab. Empat Lawang	41,535,000	90	150,000,000	30	0	0	56,160,000	100	52,659,000	60	5,910,000	3
Kab. Banyu Asin	46,585,000	105	150,000,000	30	20,449,000	37	68,920,000	70	24,404,800	30	4,420,000	1
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	34,640,000	80	150,000,000	30	0	0	83,682,000	100	20,640,000	35	840,000	1
Kota Pagar Alam	30,800,000	80	150,000,000	30	0	0	83,000,000	260	27,130,000	30	10,560,000	1
Kota Palembang	46,639,200	132	150,000,000	30	20,449,000	63	83,744,400	150	18,970,000	90	2,700,000	1
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	46,810,000	160	150,000,000	30	17,845,000	42	35,850,000	140	25,197,000	30	955,000	1
Kota Prabumulih	46,640,000	150	150,000,000	30	0	0	68,930,000	105	24,405,000	50	4,410,000	1
Kota Lubuklinggau	46,640,000	80	150,000,000	30	19,405,000	36	61,744,000	70	27,600,000	30	3,640,000	1
Kab. Ogan Ilir	46,640,000	88	150,000,000	30	0	0	68,920,000	73	23,745,000	73	5,080,000	1
Kab. Musi Banyuasin	46,640,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	68,920,000	70	24,405,000	30	4,420,000	1
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	46,444,400	80	150,000,000	30	0	0	61,070,100	70	21,972,000	30	3,900,000	1
Kab. Ogan Komering Ulu	46,580,000	126	150,000,000	30	20,449,000	48	71,068,000	112	19,682,000	112	4,728,000	1
Kab. Musi Rawas	43,700,000	80	150,000,000	30	0	0	80,127,000	70	19,950,000	60	1,300,000	1
Kab. Muara Enim	46,640,000	80	150,000,000	30	0	0	69,470,000	80	24,575,000	34	3,700,000	1
Kab. Musi Rawas Utara	44,865,000	96	150,000,000	30	0	0	65,920,000	70	18,705,000	30	6,210,000	2
Kab. Ogan Komering Ilir	48,720,000	80	150,000,000	30	21,230,000	44	72,300,000	70	24,195,100	31	4,260,000	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Lahat	4,110,000	1	23,940,000	126	29,467,800	29	8,220,000	2	125,696,000	276	485,332,050
Kab. Empat Lawang	5,910,000	3	1,600,000	5	23,200,000	12	5,910,000	3	120,610,000	400	463,494,000
Kab. Banyu Asin	5,745,000	1	23,600,000	84	29,500,000	25	6,712,500	2	125,434,000	318	505,770,300
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	630,000	1	9,000,000	30	63,070,000	35	1,008,000	2	105,600,000	300	469,110,000
Kota Pagar Alam	3,975,000	1	25,200,000	84	71,900,000	35	10,560,000	2	72,209,000	300	485,334,000
Kota Palembang	4,400,000	2	35,918,216	180	79,250,000	77	6,300,000	2	115,616,184	358	563,987,000
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,200,000	4	56,250,000	75	54,500,000	30	4,140,000	3	112,036,000	232	505,783,000
Kota Prabumulih	4,095,000	1	7,488,000	144	29,500,000	30	8,190,000	3	125,452,000	350	469,110,000
Kota Lubuklinggau	4,000,000	2	10,800,000	24	29,400,000	12	8,160,000	2	128,260,000	240	489,649,000
Kab. Ogan Ilir	3,498,750	1	24,798,250	75	27,600,000	12	9,600,000	2	125,452,000	276	485,334,000
Kab. Musi Banyuasin	4,095,000	1	23,712,000	75	29,500,000	12	8,190,000	2	125,452,000	200	505,783,000
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3,637,500	1	25,650,000	60	40,700,000	23	7,275,000	2	108,461,000	200	469,110,000
Kab. Ogan Komering Ulu	4,108,000	1	39,000,000	260	32,100,000	12	8,216,000	2	125,452,000	276	521,383,000
Kab. Musi Rawas	650,000	1	44,850,000	75	18,750,000	15	1,300,000	2	124,650,000	200	485,277,000
Kab. Muara Enim	3,525,000	1	30,000,000	100	24,635,500	26	7,050,000	2	125,738,500	256	485,334,000
Kab. Musi Rawas Utara	6,210,000	2	13,800,000	30	40,000,000	24	6,210,000	2	117,190,000	300	469,110,000
Kab. Ogan Komering Ilir	3,945,000	1	37,800,000	126	29,500,000	12	7,890,000	2	121,542,900	200	521,383,000



## Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Karo	49,296,000	84	150,000,000	30	24,049,000	55	69,615,000	90	20,130,000	35	1,710,000	1
Kab. Humbang Hasundutan	44,740,000	80	150,000,000	30	0	0	70,380,000	70	16,700,000	30	2,170,000	1
Kab. Padang Lawas	46,640,000	86	150,000,000	30	0	0	56,880,000	70	28,517,500	48	9,510,000	1
Kab. Padang Lawas Utara	68,005,000	80	150,000,000	30	0	0	51,885,000	70	10,228,000	30	4,952,000	2
Kab. Labuhan Batu Selatan	46,600,000	80	150,000,000	30	20,449,000	36	69,900,000	80	24,405,000	30	2,420,000	1
Kota Pematang Siantar	45,600,000	100	150,000,000	30	12,150,000	110	66,000,000	100	6,525,000	30	3,900,000	4
Kab. Tapanuli Selatan	46,666,400	80	150,000,000	30	20,422,000	36	68,920,000	100	24,565,000	30	4,260,000	2
Kab. Asahan	41,922,000	100	180,000,000	36	20,323,200	40	72,196,800	100	17,659,500	50	2,468,000	1
Kota Sibolga	33,074,400	92	165,000,000	33	0	0	51,079,000	70	13,284,000	30	8,784,000	4
Kota Padangsidempuan	46,310,860	90	150,000,000	30	21,956,500	36	77,102,560	100	18,630,800	30	2,512,500	1
Kota Medan	46,640,000	160	150,000,000	30	20,449,000	60	61,400,000	140	28,845,000	120	7,500,000	2

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Karo	3,420,000	2	11,687,000	24	34,040,000	12	5,560,000	2	120,052,000	240	489,559,000
Kab. Humbang Hasundutan	4,340,000	1	7,280,000	30	44,005,000	21	6,510,000	2	122,073,900	270	468,198,900
Kab. Padang Lawas	6,340,000	2	9,800,000	40	32,630,500	12	6,340,000	2	122,452,000	270	469,110,000
Kab. Padang Lawas Utara	4,952,000	2	27,000,000	30	43,050,000	15	7,428,000	3	101,610,000	200	469,110,000
Kab. Labuhan Batu Selatan	3,450,000	1	8,000,000	20	29,400,000	12	8,160,000	2	125,452,000	310	488,236,000
Kota Pematang Siantar	3,900,000	4	11,059,000	120	68,775,000	31	3,900,000	4	117,750,000	240	489,559,000
Kab. Tapanuli Selatan	3,280,000	2	12,095,200	24	29,728,000	12	4,170,000	3	125,452,400	360	489,559,000
Kab. Asahan	4,936,000	2	23,625,000	100	27,840,000	12	7,404,000	3	107,408,500	375	505,783,000
Kota Sibolga	8,784,000	4	4,500,000	24	66,270,400	24	8,784,000	4	109,550,000	400	469,109,800
Kota Padangsidimpuan	7,200,000	2	6,750,000	30	29,800,000	12	5,025,000	2	124,105,120	300	489,393,340
Kota Medan	7,860,000	2	39,300,000	131	59,012,000	27	4,425,000	2	125,452,000	300	550,883,000

KABUPATEN/KOTA	PAGURKA 1A	TARGET OUTPUT 1A	PAGURKA 1B	TARGET OUTPUT 1B	PAGURKA 2A	TARGET OUTPUT 2A	PAGURKA 3A	TARGET OUTPUT 3A	PAGURKA 3B	TARGET OUTPUT 3B	PAGURKA 3C	TARGET OUTPUT 3C
Kab. Labuhan Batu Utara	46.839,200	84	150.000,000	30	20.449,000	42	57.488,000	70	38.019,000	36	2.238,000	1
Kab. Deli Serdang	54.302,560	150	150.000,000	30	23.382,760	42	51.538,660	100	10.866,340	50	1.712,140	1
Kab. Nias Barat	46.640,000	80	150.000,000	30	20.449,000	36	65.900,000	70	27.195,000	30	4.650,000	1
Kota Tanjung Balai	46.162,000	100	150.000,000	30	12.314,000	52	81.644,000	100	13.185,000	50	1.800,000	1
Kota Tebing Tinggi	49.437,500	100	125.000,000	35	20.396,500	40	65.187,000	70	19.665,500	30	3.375,000	1
Kab. Toba Samosir	48.477,800	80	150.000,000	30	18.611,200	58	53.135,990	70	26.018,090	60	3.130,000	1
Kab. Nias	51.260,000	40	150.000,000	30	0	0	79.310,000	70	46.230,000	60	3.560,000	1
Kab. Tapanuli Tengah	73.985,600	140	150.000,000	30	20.991,600	40	63.364,800	70	24.367,400	30	1.590,000	1
Kab. Langkat	42.440,000	100	150.000,000	30	22.549,000	40	47.300,000	100	42.695,000	75	6.150,000	2
Kab. Batu Bara	41.167,428	80	150.000,000	30	17.964,284	36	73.974,338	100	22.330,272	35	4.715,456	1
Kab. Tapanuli Utara	51.110,000	80	150.000,000	30	48.490,000	60	60.610,000	70	28.029,000	30	4.212,600	1

KABUPATEN/KOTA	PAGU RKA 4A	TARGET OUTPUT 4A	PAGU RKA 4B	TARGET OUTPUT 4B	PAGU RKA 4C	TARGET OUTPUT 4C	PAGU RKA 4D	TARGET OUTPUT 4D	PAGU RKA 5A	TARGET OUTPUT 5A	Total Pagu RKA
Kab. Labuhan Batu Utara	2,128,500	1	6,800,000	12	31,600,000	12	4,257,000	2	125,364,000	300	485,182,700
Kab. Deli Serdang	2,662,140	1	27,690,000	71	22,300,000	12	5,324,280	2	139,780,120	300	489,559,000
Kab. Nias Barat	12,285,000	2	0	0	29,500,000	24	0	0	125,452,000	230	482,071,000
Kota Tanjung Balai	5,400,000	3	5,400,000	30	29,500,000	12	5,400,000	3	138,754,000	400	489,559,000
Kota Tebing Tinggi	1,875,000	1	26,250,000	83	97,380,000	40	4,125,000	2	76,867,500	400	489,559,000
Kab. Toba Samosir	3,130,000	2	18,580,000	60	24,305,000	12	3,258,000	2	140,912,920	200	489,559,000
Kab. Nias	2,345,000	1	4,090,000	6	29,500,000	12	2,622,000	2	94,577,000	200	463,494,000
Kab. Tapanuli Tengah	1,416,000	1	19,800,000	24	31,380,000	12	2,832,000	2	99,831,600	200	489,559,000
Kab. Langkat	3,285,000	1	29,812,000	75	29,500,000	12	6,600,000	2	125,452,000	300	505,783,000
Kab. Batu Bara	4,715,456	1	10,800,000	48	43,250,000	18	4,715,456	2	115,926,310	300	489,559,000
Kab. Tapanuli Utara	3,478,000	1	26,880,000	24	22,448,400	12	6,956,000	2	87,345,000	200	489,559,000

**Keterangan :**

- Pagu RKA : Pagu pada Berita Acara Kesepakatan RKA yang merupakan pagu maksimal untuk pelaksanaan suatu rincian kegiatan
- Target Output : Target pada Berita Acara Kesepakatan yang merupakan target minimal yang hendak dicapai dalam pelaksanaan suatu rincian kegiatan
- 1A : Rincian kegiatan Bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian
- 1B : Rincian kegiatan Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas
- 2A : Rincian kegiatan Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan
- 3A : Rincian kegiatan Penyelenggaraan BIMTEK keamanan pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- 3B : Rincian kegiatan Pengawasan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTI)
- 3C : Rincian kegiatan Pengkajian ulang Sertifikat Produksi
- 4A : Rincian kegiatan Inventarisasi sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- 4B : Rincian kegiatan Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- 4C : Rincian kegiatan Sampling dan pengujian Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
- 4D : Rincian kegiatan Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- 5A : Rincian kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keamanan Pangan
- Total Pagu RKA : Total pagu pada Berita Acara Kesepakatan RKA yang merupakan pagu maksimal untuk pelaksanaan seluruh rincian kegiatan yang telah disepakati

ANAK LAMPIRAN I.2  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
MENU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

**FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT  
DAK NONFISIK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TA 2021**

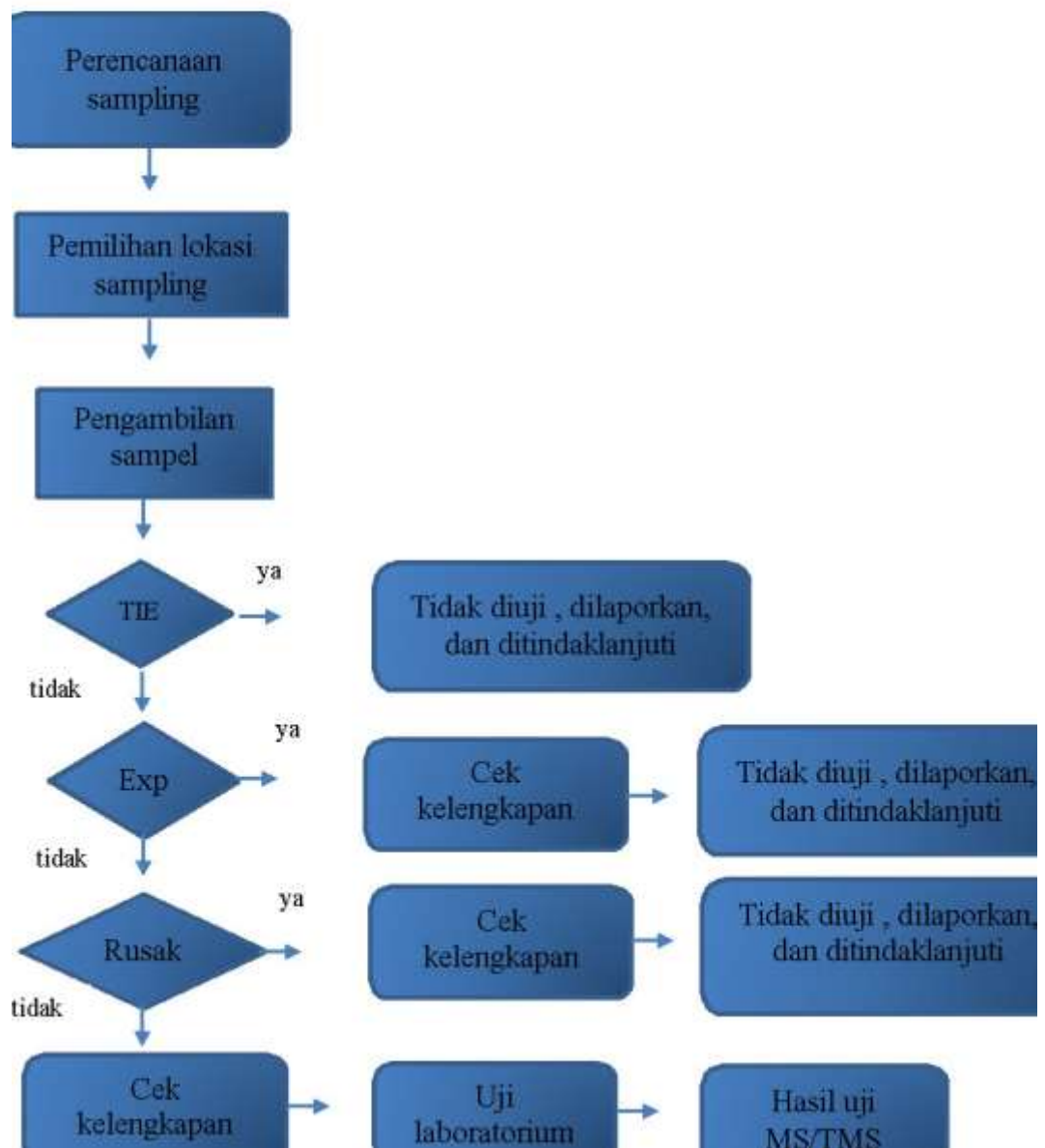
No	Rincian Menu	Rincian Kegiatan	Anggaran		Output			Kendala	Tindak Lanjut
			Pagu Anggaran (4)	Realisasi Anggaran (5)	Target (6)	Capaian (7)	Satuan (8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	A. Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian B. Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas					Orang		
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data, Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat dan UMOT	A. Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan					Orang		
3	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikasi produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT	A. Penyelenggaraan BIMTEX keamanan pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) B. Pengawasan dalam rangka pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) C. Pengkajian ulang Sertifikat Produksi					Orang		
4	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	A. Inventarisasi sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) B. Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) C. Sampling dan pengujian Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) D. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)					Dokumen		
5	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitmen dan Pemberdayaan Masyarakat	A. KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keamanan Pangan					Dokumen		
							Orang		

**Petunjuk Pengisian :**

- Kolom (1) : sudah terisi pada aplikasi
- Kolom (2) : sudah terisi pada aplikasi
- Kolom (3) : sudah terisi pada aplikasi
- Kolom (4) : sudah terisi pada aplikasi (merupakan pagu yang telah disepakati pada Berita Acara Kesepakatan)
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah pelaksanaan anggaran bulan yang dilaporkan atau diisi dengan nihil jika tidak terdapat pelaksanaan anggaran
- Kolom (6) : sudah terisi pada aplikasi (merupakan target yang telah disepakati pada Berita Acara Kesepakatan)
- Kolom (7) : diisi dengan capaian output pada bulan yang dilaporkan atau diisi dengan nihil jika tidak terdapat capaian output pada bulan yang dilaporkan
- Kolom (8) : sudah terisi pada aplikasi
- Kolom (9) : diisi dengan kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan (jika ada)
- Kolom (10) : diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada (kolom 10)

ANAK LAMPIRAN II.1  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
 KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN MENU  
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

SKEMA SAMPLING DAN PENGUJIAN





ANAK LAMPIRAN II.2  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
 KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN MENU  
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

PARAMETER UJI KIMIA BAHAN BERBAHAYA,  
 CEMARAN MIKROBIOLOGI, CEMARAN LOGAM BERAT, DAN KADAR BTP

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
1	Hasil Olahan Daging Kering	PK Nitrit	Maks. 30 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Cemaran Pb	Maks. 0,5 mg/kg	Per BPOM No. 5 Tahun 2018						
		Identifikasi Formalin	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012						
2	Hasil Olahan Ikan Kering	Identifikasi Boraks	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Formalin	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
		PK Cemaran Pb	0,20 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 0,40)	Per BPOM No. 5 Tahun 2018						
3	Hasil Olahan Unggas Kering	Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	<i>Escherichia coli</i>	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
		PK Cemaran Pb	Maks. 0,5 mg/kg	Per BPOM No. 5 Tahun 2018	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi Formalin	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012						
4	Hasil Olahan Sayur (Manisan/Keripik/Asinan)	PK Asam benzoat	Maks. 500 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Eschericia coli</i>	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 160 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Siklomat	Maks. 250 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
5	Hasil Olahan Kelapa (Geplak/Serundeng/sejenisnya)	PK Asam benzoat	Maks. 500 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Eschericia coli</i>	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 160 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Siklomat	Maks. 250 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
6	Tepung dan Hasil Olahannya (Biskuit/Keik/Kue/Mie/Bihun/dan sejenisnya)	Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	Enterobacteriaceae	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
		PK Cemaran Pb	Maks. 0,5 mg/kg (produk bakeri), 0,25 (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0)	Per BPOM No. 5 Tahun 2018						
		PK Sakarin	Maks. 100 mg/kg (serelia, puding), maks 170 mg/kg (Produk bakeri, keik, kue)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Siklomat	Maks. 250 mg/kg ( produk puding), maks 600 mg/kg (produk bakeri)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi Boraks	Negatif	Permenkes No. 033 tahun 2012						
7	Minyak dan Lemak (Minyak kelapa/minyak wijen/ dan sejenisnya)	Bilangan Peroksida	Maks. 5,0 mg oksigen/g	SNI 2902:1992						
		PFA (Asam Lemak Bebas),	Maks. 5%	SNI 2902:1992						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
8	Selai/ jelly/ jam/ dan sejenisnya	PK Asam benzoat	Maks. 200 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Escheria coli</i>	5	0	<3 APM/g	NA	Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Siklomat	Maks. 1000 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan khamir	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> koloni/g	Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 200 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
		Identifikasi / PK Pewarna :	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
9	Gula/ Kembang gula/ Madu/Sirup/ Enting-enting/ coklat Cetak/dan sejenisnya	PK Sakarin	Maks. 300 mg/kg (sirup)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Entero bacteri aceae	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> kolo ni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 500 mg/kg (kembang gula, produk coklat), maks 350mg/kg siap dikonsumsi (sirup)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan khamir	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> kolo ni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Asam benzoat	Maks. 500 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
10	Kopi/ teh Kering	PK Kafein	kopi premiks maksimal 1500 mg/kg , kopi instan minimal 2.5 % , kopi bubuk 0.45-2 %	SNI 8773:2019 kopi premiks , SNI 2983:2014 kopi instan , SNI 3542 2004 kopi bubuk	Kapang dan Khamir	5	2	10 <sup>2</sup> kol/g	10 <sup>5</sup> kol/ g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK cemaran Pb	Maksimal 2,0 mg/kg	Per BPOM No. 5 Tahun 2018						
11	Bumbu (bumbu siap pakai/saus/ kecap/sambal/dan sejenisnya)	PK Asam benzoat	Maks. 600 mg/kg (bumbu), 1000 mg/kg (saus/kecap /sambal)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Entero bacteri aceae	5	2	10 <sup>5</sup> koloni /g	10 <sup>4</sup> kolo ni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Cemaran Pb	Maks. 1,0 mg/kg	PerBPOM No 5 Tahun 2018						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
12	Rempah-rempah	PK Asam benzoat	Maks. 600 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Entero bacteriaceae	5	2	10 <sup>3</sup> koloni /g	10 <sup>4</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Cemaran Pb	Maks. 1,0 mg/kg	PerBPOM No 5 Tahun 2018						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
13	Minuman serbuk	PK Sakarin	Maks. 300 mg/kg (untuk produk yang siap dikonsumsi)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan khamir	5	2	10 koloni /ml	10 <sup>2</sup> koloni/ml	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 350 mg/kg (siap dikonsumsi)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
		PK Asam benzoat	Maks. 600 mg/kg (untuk produk yang siap dikonsumsi)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
14	Hasil Olahan Buah (Manisan/Ke ripik/Asinan /wajik buah/dodol/lempok/ dan sejenisnya)	PK Asam benzoat	Maks. 500 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Escheria coli</i>	5	2	10 koloni /g	10 <sup>2</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 100 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						
		Identifikasi / PK Siklamat	Maks. 250 mg/kg	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						

NO	JENIS PANGAN	PENGUJIAN FISIKA - KIMIA			PENGUJIAN MIKROBIOLOGI					
		PARAMETER UJI	SYARAT BATAS MAKSIMAL	REFERENSI SYARAT	PARAMETER UJI	JUMLAH		SYARAT		REFERENSI SYARAT
		Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019						
15	Hasil olahan Biji-bijian/kacang-kacangan/umbi-umbian)	Identifikasi / PK Pewarna	Negatif jika Bahan Berbahaya ; Pewarna diijinkan sesuai ketentuan	Permenkes no 33 tahun 2012 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	Enterobacteriaceae	5	2	10 <sup>2</sup> koloni /g	10 <sup>3</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		PK Sakarin	Maks. 100 mg/kg (makanan ringan)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/ 25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
		Identifikasi/ PK siklamat	Negatif (,makanan ringan)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019						

Metode: Sesuai dengan laboratorium penguji